



LKJIP 2025

KABUPATEN HALMAHERA UTARA



 <https://halmaherautarakab.go.id>

 setda@halmaherautarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dapat disusun.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidasi atas laporan kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Halmahera Utara.

Tobelo, 30 Maret 2026

Bupati Halmahera Utara,



Dr. Piet Hein Babua, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang Tahun 2025, dan akhir periode RPJMD 2021-2026.

Pada awal Tahun 2021 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah "***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan***". Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 4 (empat) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 7 (tujuh) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran pada kategori **Baik Sekali** dengan

persentase rata-rata **102,12%** dan 1 (satu) sasaran pada kategori **Baik** atau **91,82%**. Capaian kinerja pada misi 1 memiliki persentase rata-rata **96,97%**;

- Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran pada kategori **Baik** dengan persentase rata-rata **99,04%** dan 1 (satu) sasaran pada kategori **Cukup** atau **70,49%**. Capaian kinerja pada misi 2 memiliki persentase rata-rata **84,77%**;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 (dua) sasaran pada kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **226,81%** dan **134,23%**. Capaian kinerja pada misi 3 memiliki persentase rata-rata **180,52%**;
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran adalah kategori **Baik Sekali** atau persentase rata-rata **127,07%**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.2.1 KEADAAN GEOGRAFIS WILAYAH	2
1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3
1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI	5
1.2.4 DEMOGRAFI	5
1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI	6
1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
1.4 SUMBER DAYA APARATUR	10
1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	12
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	27
2.1.1 VISI & MISI	27
2.1.2 PROGRAM	30
2.2 PERJANJIAN KINERJA	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	36
3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2025	36
3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA	37
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	92
BAB IV PENUTUP	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara	3
Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara	3
Gambar 3. Grafik Indeks Kesehatan Daerah	40
Gambar 4. Grafik Perbandingan Indeks Kesehatan Daerah	41
Gambar 5. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Gender	47
Gambar 6. Grafik Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki	48
Gambar 7. Grafik Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan	48
Gambar 8. Grafik Rata-rata Lama Sekolah Laki-Laki	49
Gambar 9. Grafik Rata-rata Lama Sekolah Perempuan	49
Gambar 10. Grafik Pengeluaran Per Kapita Laki-laki	50
Gambar 11. Grafik Pengeluaran Per Kapita Perempuan	51
Gambar 12. Grafik Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara	51
Gambar 13. Grafik Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Halmahera Utara	53
Gambar 14. Grafik Laju Pertumbuhan Investasi PMTB	69
Gambar 15. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan 2010	71
Gambar 16. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	74
Gambar 17. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kab. Halmahera Utara	76
Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan	5
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025	6
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
Tabel 4. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara	8
Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Utara	10
Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 7. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2025	31
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025	34
Tabel 9. Capaian Kinerja	36
Tabel 10. Pencapaian Indikator Sasaran	36
Tabel 11. Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2025	36
Tabel 12. Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2025	37
Tabel 13. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025	37
Tabel 14. Sasaran Strategis 1	39

Tabel 15. Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota (Tahun)	39
Tabel 16. Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	40
Tabel 17. RLS, HLS, DAN IPD TAHUN 2025	43
Tabel 18. Pagu Anggaran dan Realisasi Program	44
Tabel 19. Sasaran Strategis 2	45
Tabel 20. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2025	46
Tabel 21. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023-2025	47
Tabel 22. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023-2025	48
Tabel 23. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)	50
Tabel 24. Indeks Ketahanan Sosial Per-Kecamatan Tahun 2025	53
Tabel 25. Data Desa dengan Dimensi Sosial sesuai dengan IKS Tahun 2025	54
Tabel 26. Pagu Anggaran dan Realisasi Program	55
Tabel 27. Sasaran Strategis 3	57
Tabel 28. Rumah Tangga Akses Air Minum Bersih	58
Tabel 29. Rumah Tangga Bersanitasi Layak	59
Tabel 30. Pagu Anggaran dan Realisasi Program	62
Tabel 31. Sasaran Strategis 4	63
Tabel 32. Indeks Ketahanan Lingkungan Per-Kecamatan Tahun 2025	64
Tabel 33. Perbandingan Indeks Ketahanan Lingkungan per Kecamatan Tahun 2024 dan Tahun 2025	64
Tabel 34. Pagu Anggaran dan Realisasi Program	66
Tabel 35. Sasaran Strategis 5	68
Tabel 36. Data Investasi	69
Tabel 37. Capaian Komoditas Tanaman Perkebunan Tahun 2024-2025	71
Tabel 38. Capaian Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2024-2025	71
Tabel 39. Capaian Populasi Ternak dan Unggas Tahun 2024-2025	72
Tabel 40. Capaian Produksi Perikanan dan Kelautan 2024-2024	72
Tabel 41. Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara	74
Tabel 42. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Halmahera Utara	75
Tabel 43. Jumlah Perusahaan menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Halmahera Utara	77
Tabel 44. Jumlah Perusahaan menurut Klasifikasi Izin di Kabupaten Halmahera Utara	77
Tabel 45. Pagu Anggaran dan Realisasi Program	79
Tabel 46. Sasaran Strategis 6	80
Tabel 47. Indeks Ketahanan Ekonomi Per-Kecamatan Tahun 2025	81
Tabel 48. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota	83

Tabel 49. Pagu Anggaran dan Realisasi Program	84
Tabel 50. Sasaran Strategis 7	86
Tabel 51. Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara	87
Tabel 52. Pagu Anggaran dan Realisasi Program	91
Tabel 53. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2025	93
Tabel 54. Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas. "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Beberapa peraturan terkait yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Halmahera Utara nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja pemerintah Daerah menyatakan Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan untuk disampaikan ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAPPENAS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Halmahera Utara disusun secara periodik pada setiap akhir Tahun anggaran sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai Visi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, agar mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu Tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 Keadaan Geografis Wilayah

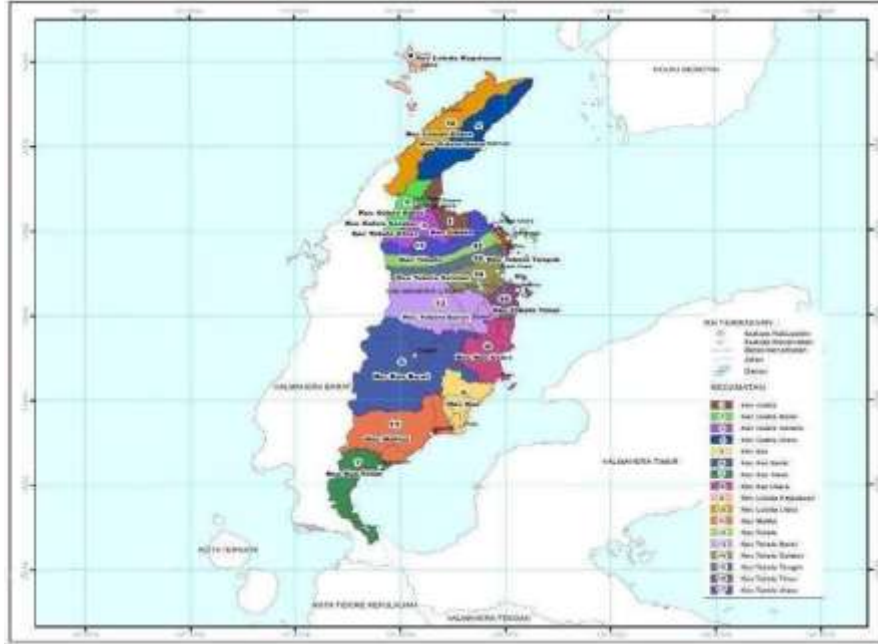
Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di Tobelo. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.019,96 Km², meliputi daratan seluas 3.404,28 Km² (15,5%) dan lautan 18.615,68 Km² (84,5%), dan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kab. Pulau Morotai dan Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah agraris sekaligus maritim merujuk pada panjang garis pantai yang mencapai 515,1 km atau 7,5% dari total garis pantai Provinsi Maluku Utara sepanjang 6.823,5 km. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi alam yang besar meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru, sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Seiring ditetapkannya Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri berdasarkan UU No. 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, jumlah kecamatan berubah menjadi 17 dan 196 desa.

Disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, peta wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara

1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. **Perisai besar dengan warna dasar biru** bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;
2. **Humarang dan salawaku** mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten

- Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo;
3. **Daun kelapa berwarna hijau** dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;
 4. **Lingkar putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa.** Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
 5. **Segi lima berwarna kuning keemasan** bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
 6. **Laut dan gelombang** melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan batin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;
 7. **Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara** bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
 8. **Warna putih dalam perisai segi lima** melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 9. **Hibualamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam** bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 10. **Angka 2003** bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif, saat ini Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa. Wilayah kecamatan dengan luas terbesar adalah Kao Barat dengan proporsi 24,56%, disusul Kecamatan Malifut dengan proporsi 10,56%, serta Galela Utara dengan proporsi 7,89% dan Loloda Utara dengan proporsi 7,27% dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Galela, Tobelo Timur dan Loloda Kepulauan, masing-masing dengan proporsi 2,80%, 2,16% dan 1,52% dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan terjadi pada luas Kecamatan Kao Teluk, yaitu dari 158,57 Km² menjadi 111,83 Km² menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019.

Rincian luas wilayah masing-masing kecamatan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Km ²	Proporsi (%)
1	Malifut	Ngofakiaha	22	359,44	10,56
2	Kao Teluk	Dum Dum	11	111,83	3,28
3	Kao	Kao	14	138,43	4,07
4	Kao Barat	Tolabit	21	835,93	24,56
5	Kao Utara	Daru	12	221,85	6,52
6	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	13	136,01	4,00
7	Tobelo Barat	Kusuri	5	249,81	7,34
8	Tobelo Timur	Mawea	6	73,52	2,16
9	Tobelo	Gamsungi	10	126,07	3,70
10	Tobelo Tengah	Pitu	9	111,99	3,29
11	Tobelo Utara	Gorua	10	151,56	4,45
12	Galela	Soa Sio	7	95,47	2,80
13	Galela Selatan	Soakonora	7	113,86	3,34
14	Galela Barat	Dokulamo	9	110,59	3,25
15	Galela Utara	Salimuli	12	268,68	7,89
16	Loloda Utara	Dorume	18	247,62	7,27
17	Loloda Kepulauan	Dama	10	51,61	1,52
Total			196	3.404,27	100,00

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2024

1.2.4 Demografi

Data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2025 adalah **207.623** jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah **106.416** jiwa dan perempuan **101.207** jiwa. Dan Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak dengan jumlah **35.218** jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu **6.322** jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Laki-Laki)	Jumlah Penduduk (Perempuan)	Total Penduduk (Jiwa)
1	GALELA	4.583	4.359	8.942
2	TOBELO	17.827	17.391	35.218
3	TOBELO SELATAN	8.149	7.817	15.966
4	KAO	5.122	4.704	9.826
5	MALIFUT	7.019	6.826	13.845
6	LOLODA UTARA	5.631	5.161	10.792
7	TOBELO UTARA	6.280	6.251	12.531
8	TOBELO TENGAH	8.704	8.389	17.093
9	TOBELO TIMUR	3.803	3.572	7.375
10	TOBELO BARAT	3.348	2.974	6.322
11	GALELA BARAT	6.030	5.793	11.823
12	GALELA UTARA	5.012	4.458	9.470
13	GALELA SELATAN	4.797	4.853	9.470
14	LOLODA KEPULAUAN	3.852	3.681	7.533
15	KAO UTARA	7.483	6.925	14.408
16	KAO BARAT	5.296	4.695	9.991
17	KAO TELUK	3.480	3.358	6.838
TOTAL		106.416	101.207	207.623

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk semester 1 Tahun 2025

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat

dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kategori PDRB	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Halmahera Utara (Persen)		
	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,41	24,61	24,12
Pertambangan dan Penggalian	30,37	27,75	29,10
Industri Pengolahan	2,63	3,00	3,34
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10
Konstruksi	6,76	6,67	6,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,49	13,32	13,33
Transportasi dan Pergudangan	2,38	2,47	2,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,26	0,26
Informasi dan Komunikasi	2,49	2,49	2,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,93	1,95
Real Estate	0,06	0,06	0,06
Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,18	12,25	11,5
Jasa Pendidikan	2,72	2,72	2,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,75	1,69
Jasa lainnya	0,43	0,43	0,42
Total PDRB	100	100	100

Sumber Data: BPS pada buku "Kabupaten Halmahera Utara dalam angka Tahun 2026"

Keterangan: 2024 menggunakan angka sementara, 2025 menggunakan angka sangat sementara

1.3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*),

dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
- b. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
- c. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
- d. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
- e. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 6 Badan, 22 Dinas dan 17 Kecamatan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor 3 Tahun 2025 dibentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sehingga total OPD yang melakukan pelayanan pada Tahun 2025 sebanyak 49 OPD.

Tabel 4
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Organisasi Perangkat Daerah			
No			
1	SEKRETARIAT	1	Sekretariat Daerah

No		Organisasi Perangkat Daerah	
		-	Bagian Tata Pemerintahan
		-	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		-	Bagian Organisasi
		-	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		-	Bagian Umum dan Perlengkapan
		-	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		-	Bagian Korpri
		2	Sekretariat DPRD
2	INSPEKTORAT	3	Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
3	DINAS	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Dinas Kesehatan
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo
		6	Dinas Pariwisata
		7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		10	Dinas Sosial
		11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12	Dinas Pertanian
		13	Dinas Kelautan dan Perikanan
		14	Dinas Perhubungan
		15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		16	Dinas Lingkungan Hidup
		17	Dinas Ketahanan Pangan
		18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	BADAN	26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		29	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		31	Badan Pendapatan Daerah
		32	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
5	KECAMATAN	33	Kantor Camat Kao Teluk
		34	Kantor Camat Malifut
		35	Kantor Camat Kao

No	Organisasi Perangkat Daerah		
		36	Kantor Camat Kao Barat
		37	Kantor Camat Kao Utara
		38	Kantor Camat Tobelo Barat
		39	Kantor Camat Tobelo Timur
		40	Kantor Camat Tobelo Selatan
		41	Kantor Camat Tobelo Tengah
		42	Kantor Camat Tobelo
		43	Kantor Camat Tobelo Utara
		44	Kantor Camat Galela
		45	Kantor Camat Galela Selatan
		46	Kantor Camat Galela Barat
		47	Kantor Camat Galela Utara
		48	Kantor Camat Loloda Utara
		49	Kantor Camat Loloda Kepulauan

Sumber Data: Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2025

1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Akhir Tahun 2025 yang masih melaksanakan tugas sebanyak **4.566** pegawai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) **3.027** dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **1.539** masing-masing laki-laki berjumlah **1.676** pegawai dan perempuan berjumlah **2.890** pegawai sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Utara
PNS dan PPPK berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama OPD	Jenis Kelamin		Jumlah PNS	Jenis Kelamin		Jumlah PPPK
		L	P		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretariat Daerah	5	1	6			
	Bagian Tata Pemerintahan	10	1	11	2	1	3
	Bagian Hukum dan HAM	7	3	10		1	1
	Bagian Organisasi	4	7	11	1		1
	Bagian Perekonomian dan Kesra	6	4	10		1	1
	Bagian Umum dan Perlengkapan	10	9	19	4		4
	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	4	1	5	2		2
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5	3	8			
	Bagian Korpri	2	5	7			
2	Sekretariat DPRD	15	14	29	8	6	14
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29	23	52	1	6	7
	Korwil Dinas Pendidikan	6	8	14			
	Taman Kanak Kanak (TK)		35	35			

No	Nama OPD	Jenis Kelamin		Jumlah PNS	Jenis Kelamin		Jumlah PPPK
		L	P		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sekolah Dasar (SD)	289	566	855			
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	107	184	291			
	Dinas Kesehatan	21	36	57	1	6	7
	Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo	48	151	199	25	82	107
	Rumah Sakit Bethesda				2	11	13
	Klinik Utama Kao		6	6		1	1
	Puskesmas Dum-Dum Kao Teluk	1	21	22	1	8	9
	Puskesmas Bobane Igo Kao Teluk	4	9	13	2	13	15
	Puskesmas Malifut	5	24	29		11	11
4	Puskesmas Kao	2	12	14	1	10	11
	Puskesmas Toliwang Kao Barat	4	17	21	4	8	12
	Puskesmas Daru Kao Utara	2	22	24	3	11	14
	Puskesmas Kusuri Tobelo Barat	3	9	12	2	9	11
	Puskesmas Mawea Tobelo Timur	5	20	25	3	5	8
	Puskesmas Kupa-Kupa Tobelo Selatan	7	42	49		7	7
	Puskesmas Pitu Tobelo Tengah	1	36	37	1	11	12
	Puskesmas Tobelo	5	49	54	1	8	9
	Puskesmas Gorua Tobelo Utara	3	34	37		16	16
	Puskesmas Galela	3	30	33	4	11	15
	Puskesmas Soakonora Galela Selatan	1	19	20	1	10	11
	Puskesmas Dokulamo Galela Barat	2	10	12	1	25	26
	Puskesmas Salimuli Galela Utara	3	12	15		17	17
	Puskesmas Dorume Loloda Utara	4	7	11		9	9
	Puskesmas Supu Loloda Utara	4	6	10	2	11	13
	Puskesmas Dama Loloda Kepulauan	6	6	12	2	13	15
5	Dinas Pariwisata	11	10	21	3	2	5
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25	11	36	5	4	9
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13	6	19	2	2	4
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16	9	25	2	5	7
9	Dinas Sosial	6	9	15	1	2	3
10	Dinas Kependudukan dan Capil	11	10	21	4	9	13
11	Dinas Pertanian	16	16	32	10	7	17
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	19	10	29	5	4	9
13	Dinas Perhubungan	36	6	42	9	6	15
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB	5	23	28	1	3	4
15	Dinas Lingkungan Hidup	19	19	38	3	7	10
16	Dinas Ketahanan Pangan	12	6	18	3	6	9
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14	10	24	2	4	6
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11	9	20	2	2	4
19	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	32	3	35	80	39	119
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	10	9	19	2	1	3
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11	2	13	3	1	4
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	10	22	2	3	5
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	6	14	2	2	4
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24	24	48	3	7	10
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17	9	26	3	8	11

No	Nama OPD	Jenis Kelamin		Jumlah PNS	Jenis Kelamin		Jumlah PPPK
		L	P		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	7	18	1	2	3
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	11	27	1	2	3
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDA	15	14	29	7	7	14
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	7	23	3	2	5
30	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik	11	8	19	4	1	5
31	Inspektorat	15	13	28	2		2
32	Kantor Camat Kao Teluk	6	5	11	1	3	4
33	Kantor Camat Malifut	11	10	21	1	1	2
34	Kantor Camat Kao	14	4	18		3	3
35	Kantor Camat Kao Barat	12	4	16	1	1	2
36	Kantor Camat Kao Utara	7	4	11	2		2
37	Kantor Camat Tobelo Barat	5	0	5	2		2
38	Kantor Camat Tobelo Timur	9	3	12	2	2	4
39	Kantor Camat Tobelo Selatan	8	5	13	1	3	4
40	Kantor Camat Tobelo Tengah	8	11	19	2	2	4
41	Kantor Camat Tobelo	6	3	9	1	3	4
42	Kantor Camat Tobelo Utara	6	6	12	6	6	12
43	Kantor Camat Galela	9	6	15	1	3	4
44	Kantor Camat Galela Selatan	14	9	23		1	1
45	Kantor Camat Galela Barat	7	6	13	2	2	4
46	Kantor Camat Galela Utara	10	0	10	1	1	2
47	Kantor Camat Loloda Utara	16	4	20	2	3	5
48	Kantor Camat Loloda Kepulauan	8	1	9	1	1	2
TOTAL		1.217	1.810	3.027	459	1.080	1.539

Sumber Data: BKD dan PSDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Skala prioritas adalah merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui program kegiatan pemerintah daerah. yang dapat dilihat pada data informasi urusan penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan fungsi penunjang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

1. Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS);
2. Masih banyak siswa SD dan SMP yang putus sekolah dan mengulang;
3. Masih banyak anak usia 4-6 tahun belum menikmati pendidikan anak usia dini, yang disebabkan:
 - a. Belum seluruh desa tersedia sarana prasarana PAUD; dan
 - b. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;
4. Masih ada lebih dari 10 persen ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak berat/rusak total;
5. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, yang disebabkan:
 - a. Sejumlah sekolah baru didirikan kurang dari empat Tahun; dan
 - b. Masih ada sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan;
6. Masih banyak guru SD dan SMP yang belum bersertifikasi pendidik, yang disebabkan:
 - a. Kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi syarat; dan
 - b. Kompetensi guru di bawah standar yang disyaratkan;
7. Belum meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah (PAUD, SD dan SMP) dikarenakan kurangnya tenaga pendidik;
8. Belum meratanya akses pendidikan non formal yang ditandai dengan masih ada kecamatan yang belum memiliki PKBM; di sisi lain ada PKBM yang tidak memiliki siswa.

KESEHATAN

1. Masih terjadi kematian Ibu, disebabkan:
 - a. Persalinan tidak ditolong tenaga kesehatan;
 - b. Persalinan tidak dilakukan di Fasilitas Kesehatan;
 - c. Ibu hamil yang melahirkan dengan komplikasi penyakit bawaan;
 - d. Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan K4;
 - e. Ada ibu hamil yang belum mendapatkan Fe 90 tablet;
 - f. Belum semua Bidan terlatih Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGDON);
 - g. Belum semua bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN);
2. Masih ada kematian Bayi, disebabkan:
 - a. Masih ada Puskesmas belum mampu melayani pelayanan neonatal esensial;
 - b. Bayi lahir dengan komplikasi yang tidak mampu ditangani;
 - c. Alat resusitasi bayi yang rusak; dan

- d. Petugas belum terlatih penggunaan Alat Resusitasi;
- 3. Prevalensi Balita *Underweight*, *Stunting* dan *Wasting* di beberapa kecamatan masih tinggi, disebabkan:
 - a. Masih ada ibu nifas yang tidak mendapatkan Vit A;
 - b. Balita yang tidak datang ke Posyandu;
 - c. Balita yang tidak mendapatkan Vit A;
 - d. Bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif;
 - e. Ibu hamil yang Kekurangan Energi Kalori (KEK);
 - f. Masih kurangnya tenaga Nutrition di Puskesmas; dan
 - g. Balita yang Gizi Buruk tidak mendapatkan penanganan;
- 4. Masih kurangnya SDM kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
- 5. Masih tingginya Angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, disebabkan belum optimalnya pelayanan, penanganan dan pencegahan, khususnya yang melibatkan masyarakat;
- 6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar, yang disebabkan:
 - a. Belum semua Puskesmas terakreditasi;
 - b. Tenaga Medik Spesialis dan Subspesialis belum terpenuhi di RS;
 - c. Fasilitas Penunjang Pelayanan Medik belum terpenuhi; dan
 - d. Masih ada Puskesmas yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional;
- 7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi, disebabkan terbatasnya sarana prasarana (jaringan irigasi sekunder) yang tersedia, di sisi lain menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun, disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumber daya air;
- 2. Masih tingginya potensi bencana (tanah longsor, banjir, erosi dan abrasi pantai) pada daerah pesisir pantai dan sungai, disebabkan belum optimalnya konservasi daerah-daerah aliran sungai, kawasan pesisir pantai dan daerah rawan longsor;
- 3. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sumber air minum aman, dikarenakan masih terbatasnya jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), di sisi lain jaringan SPAM terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas SPAM;
- 4. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak, dikarenakan masih terbatasnya sistem air limbah domestik, di sisi lain fasilitas air limbah terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta

masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas air limbah;

5. Masih banyak terdapat titik genangan pada saat hujan di kawasan perkotaan, disebabkan belum tersedianya sistem drainase perkotaan yang memadai;
6. Masih terdapat pembangunan gedung tidak sesuai standar, dikarenakan terbatasnya pengawasan bangunan gedung;
7. Belum optimalnya penyelenggaraan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas wilayah, disebabkan belum seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, serta masih terdapat jalan dan jembatan rencana yang belum terbangun;
8. Masih lemahnya tata kelola pengembangan jasa konstruksi daerah, yang disebabkan salah satunya belum tersedianya basis data jasa konstruksi yang memadai sesuai standar pelayanan minimal;
9. Masih terdapat kawasan yang peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang, disebabkan belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) revisi sesuai dengan kondisi terkini, serta belum optimalnya sistem informasi penataan.

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1. Masih terdapat Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan, dikarenakan belum optimalnya penataan kawasan, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di daerah perkotaan serta belum tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
2. Belum terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana;
3. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikarenakan kurang akuratnya basis data masyarakat berpenghasilan rendah.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman lingkungan berbasis masyarakat, disebabkan kurangnya Pos Siskamling dan Sumber Daya Manusia (SDM) santimas yang didukung sarana dan prasarana;
2. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta belum tersedianya sekretariat PPNS;
3. Belum meratanya jangkauan pelayanan Satpol PP untuk menjaga Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) di wilayah kerja, disebabkan kurang memadainya fasilitas pendukung pelayanan, serta jumlah personil Satpol PP;

4. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya Kebakaran termasuk SDM yang mempunyai standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran;
5. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, disebabkan luasnya cakupan wilayah risiko bencana serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa.

SOSIAL

1. Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
2. Belum efektifnya upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

1. Kurangnya pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan bagi pekerja maupun pencari kerja, disebabkan kurang tersedianya dan memadainya sarana dan prasarana latihan kerja di daerah;
2. Masih banyak pencari kerja yang belum bekerja, di sisi lain kompetensi pekerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia yang menjadi indikasi kurangnya *link-and-match* antara lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan pekerja dengan perusahaan, disebabkan kurang efektifnya sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang ditandai dengan masih terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, dikarenakan belum padunya kerangka kerja pemenuhan hak-hak anak pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.

PANGAN

1. Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahanan Pangan Daerah, serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan;

2. Ketersediaan Pangan Utama belum memadai, yang ditandai dengan masih tingginya pasokan pangan utama dari luar daerah (beras), produksi pangan lokal belum mampu mendukung kebutuhan pangan daerah, belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah;
3. Belum terpenuhinya ketersediaan energi dan protein per kapita masyarakat, dikarenakan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai masih tingginya ketergantungan masyarakat pada beras (nasi) sebagai sumber karbohidrat, dan rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal selain beras.

PERTANAHAN

1. Masih terdapat Lahan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dikarenakan belum selesainya pengukuran lahan;
2. Belum selesainya kasus sengketa tanah negara Tahun 2019 antara Pemerintah Daerah dengan PTPN XIV Makassar;
3. Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

LINGKUNGAN HIDUP

1. Belum tersedianya regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dikarenakan belum diperdakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, dikarenakan belum dilakukannya pengawasan terhadap izin Lingkungan bagi Usaha yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten;
3. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, yang ditandai dengan masih banyaknya timbulan sampah yang belum terangkut, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Belum optimalnya inovasi pelayanan kependudukan, yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, termasuk mutu pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Akta Pencatatan Sipil, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal masih di atas 50%, disebabkan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum efektifnya sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam

penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan; terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dikarenakan masih adanya tumpang tindih kewenangan Desa dan Kabupaten dalam pungutan PADes, serta belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha ekonomi produktif di desa;

2. Belum adanya desa berstatus mandiri, disebabkan belum adanya kerangka kerja terpadu yang melibatkan lintas sektor untuk pengembangan kawasan desa mandiri.

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Meningkatnya *Total Fertility Rate* (TFR), disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat ber-Keluarga Berencana (KB) dan kurangnya partisipasi laki-laki ber-KB, serta masih tingginya *unmet need* KB.

PERHUBUNGAN

1. Meningkatnya kasus kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, *guardrail*);
2. Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal;
3. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum;
4. Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor;
5. Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;
2. Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai

dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga *Information Technology* (IT), serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;

3. Masih terdapat wilayah/desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet.

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditengarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;
2. Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya SDM koperasi;
3. Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha.

PENANAMAN MODAL

1. Menurunnya minat Investor di kabupaten Halmahera Utara, disebabkan kurangnya fasilitas insentif penanaman modal, terbatasnya sarana informasi penanaman modal, kurang lengkapnya basis data penanaman modal, belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), serta minimnya promosi investasi daerah;
2. Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, disebabkan belum memadainya SDM dan fasilitas pelayanan.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Belum optimalnya pengembangan daya saing kepemudaan, disebabkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan;
2. Belum optimalnya pengembangan daya saing keolahragaan, disebabkan kurangnya pembinaan bagi klub olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta SDM olahraga dalam sentra pendidikan seperti guru olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. Kurangnya pembinaan organisasi kepramukaan, disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat terhadap gerakan pramuka, serta kurangnya pengembangan kapasitas SDM kepramukaan.

STATISTIK

Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dikarenakan masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

PERSANDIAN

Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman, serta belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.

KEBUDAYAAN

Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian seni budaya, serta benda cagar budaya di daerah.

PERPUSTAKAAN

1. Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan, disebabkan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa/Masyarakat terhadap pengembangan Perpustakaan di Desa;
2. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
3. Belum adanya upaya pelestarian Naskah Kuno.

KEARSIPAN

1. Masih terdapat perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku, disebabkan terbatasnya SDM kearsipan, serta kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan Arsip Statis perangkat daerah kepada Lembaga Kearsipan;
2. Masih lemahnya Penerapan SOP dan Perda tentang Kearsipan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap SOP dan Perda tentang Kearsipan di Daerah.

C. URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh (lebih besar dari 12 mil); serta keterampilan SDM perikanan tangkap jarak jauh;
2. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya, disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, meliputi antara lain benih dan pakan.

PARIWISATA

1. Masih rendahnya kunjungan pariwisata di daerah dibandingkan dengan kawasan sekitar seperti Bitung Sulawesi Utara dan Raja Ampat Papua Barat, disebabkan kurangnya promosi pariwisata, terbatasnya kapasitas pelaku pariwisata yang umumnya masih dalam skala rumah tangga, tidak adanya pusat Informasi pariwisata/TIC, belum adanya Biro Perjalanan wisata, *tour operator* yang menjual paket wisata di Halmahera Utara;

2. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, disebabkan kurangnya insentif Pengelola (fasilitas banyak yang sudah rusak, terabaikan), kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, lingkungan destinasi wisata, dan terumbu karang;
3. Kurang berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata, yang ditandai dengan belum adanya kios cinderamata yang dapat menampung hasil kerajinan khas daerah, serta masih kurangnya minat generasi muda dalam berkreasi, berinovasi dan berkarya terhadap hasil kerajinan ekonomi kreatif.

PERTANIAN

1. Belum optimalnya produksi pertanian/peternakan, yang disebabkan terbatasnya sarana produksi pertanian/peternakan meliputi bibit/benih serta belum memadainya sarana di Balai Penyuluhan Pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan; kurangnya penangkar benih yang bersertifikasi; serta kurangnya prasarana pertanian meliputi (jaringan irigasi usaha tani, Pintu Air, jalan usaha tani/produksi, Alat dan mesin pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan);
2. Belum optimalnya pengelolaan produk pertanian, yang disebabkan terbatasnya fasilitas pengolahan hasil pertanian yang bersertifikasi;
3. Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; belum tersedianya fasilitas pengolahan hasil peternakan yang bersertifikasi, serta kurangnya fasilitas di RPH;
4. Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, disebabkan kurangnya Petugas POPT di kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian/peternakan, disebabkan terbatasnya fasilitasi pelatihan bagi petani/peternak dan petugas meliputi (Magang, bimtek, workshop, diklat teknis).

KEHUTANAN

Belum berjalannya upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan umum bersumber EBT.

PERDAGANGAN

1. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
2. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
3. Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah.

PERINDUSTRIAN

1. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil;
2. Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak.

TRANSMIGRASI

1. Terhambatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru, disebabkan belum adanya pengalihan status kawasan hutan/izin prinsip merujuk pada calon kawasan tidak masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi masuk di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
2. Belum terealisasinya pengembangan Kawasan Transmigrasi, disebabkan belum adanya pengalihan status HPK ke APL untuk perluasan kawasan transmigrasi;
3. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), disebabkan masih rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan untuk pembangunan KTM yang berdampak pada pengembangan kawasan transmigrasi.

D. UNSUR PENDUKUNG, PENUNJANG DAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

1. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disebabkan belum adanya instrumen internal yang baku untuk memfasilitasi pendampingan dan pengawasan pelaporan akuntabilitas kinerja dari setiap perangkat daerah;
2. Masih minimnya jumlah kerjasama daerah yang dapat mendorong peningkatan investasi, perdagangan antar daerah, dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SEKRETARIAT DPRD

Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

PERENCANAAN

1. Belum konsistennya penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan;
2. Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART.

KEPEGAWAIAN

1. Belum optimalnya manajemen Disiplin Aparatur merujuk pada belum adanya Sistem Pengawasan Disiplin dan Pengawasan Kinerja, yang disebabkan antara lain belum tersedianya aplikasi Presensi Kehadiran Pegawai selama jam kerja secara real time dan aplikasi pemantauan kinerja berjenjang secara harian, bulanan dan Tahunan yang efektif dan efisien;
2. Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah merujuk pada masih adanya jabatan struktural maupun fungsional yang belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya data *Talent/Profil* Pegawai untuk keperluan suksesi, rotasi dan promosi, serta belum dimilikinya *Assessment Centre* secara mandiri untuk Penilaian Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Bagi setiap Jabatan yang diperlukan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur dalam tugas dan fungsi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural, yang disebabkan kurangnya pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan sesuai tupoksi sejalan dengan dinamika permasalahan daerah, dan belum terkelolanya dengan baik pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi/daerah;
2. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi manajerial kepemimpinan pejabat struktural merujuk masih banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat Diklat PIM, sebagai bagian persyaratan kompetensi jabatan, yang disebabkan batalnya pelaksanaan diklat kepemimpinan selama beberapa Tahun terakhir karena berbagai kendala dan kurangnya minat pejabat struktural untuk mengikuti diklat karena waktu diklat yang lama dan lokasi kegiatan yang diluar daerah.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Masih minimnya produk/hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah.

INSPEKTORAT DAERAH

1. Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya sesuai standar, dikarenakan SOP belum memadai;
2. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama teknis dengan aparat pengawas lainnya, merujuk pada masih minimnya tindaklanjut Kesepakatan kerja sama secara teknis dan operasional antara APIP dan APH lainnya;
3. Masih kurangnya ketersediaan Tenaga APIP bersertifikat, sarana/ prasarana penunjang pengawasan yang memadai, disebabkan anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan mandatory;
4. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat;
5. Hasil pemeriksaan APIP maupun Pengawasan Eksternal (BPK) belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para penanggungjawab, disebabkan Penanggung jawab temuan sulit untuk ditemui, meninggal, atau mutasi ke luar daerah.

KECAMATAN

1. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa, disebabkan narkoba, tawuran, serta perselisihan tapal batas desa;
2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa, disebabkan rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan Desa dan seringnya pergantian perangkat desa;
3. Masih kurangnya usaha ekonomi produktif desa merujuk pada masih banyaknya desa yang belum terbentuk BUMDes.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Masih adanya potensi konflik di masyarakat;
2. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub BAB ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub BAB ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai untuk dengan kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada BAB ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan

target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1.1. Visi & Misi

Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Halmahera Utara yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu pada Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu perumusan visi RPJMD juga mempertimbangkan acuan-acuan dimaksud. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Tabel 6

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

VISI

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN INVESTASI DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi 1: Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk kemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. (<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>)	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar Masyarakat	- Indeks Kesehatan Daerah - Indeks Pendidikan Daerah
		Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	- Indeks Pembangunan Gender - Indeks Ketahanan Sosial
Misi 2: Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk	Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar Dan penunjang ekonomi	- Indeks Pembangunan Infrastruktur

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup	keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim. (<i>Indeks Perkembangan Wilayah</i>)	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	- Indeks Ketahanan Lingkungan
Misi 3 : Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas. (<i>Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini</i>)	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	- Pertumbuhan investasi PMTB - Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan - Pertumbuhan PDRB Pariwisata - Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan - Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha usaha ekonomi produktif dan kreatif	- Indeks Ketahanan Ekonomi - Tingkat Kemiskinan
Misi 4: Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. (<i>Indeks Inovasi Daerah</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	- Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/Tahun)

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan Masyarakat:** kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya Kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya Kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang

aman, damai dan tentram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

2. **Pembangunan Berkelanjutan:** merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. **Inovasi:** pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara- cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
4. **Investasi:** Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha-usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid-19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada

melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak- banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

5. **Kebersamaan yang Berkeadilan:** Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf Pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Pengendalian Penduduk 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KA) 7. Program Pengelolaan Pendidikan 8. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	274.385.314.358
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 5. Program Perlindungan Khusus Anak 6. Program Pembinaan Perpustakaan 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 9. Program Pemberdayaan Sosial 10. Program Rehabilitasi Sosial 11. Program Penanganan Bencana 12. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 13. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 14. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 15. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 16. Program Pengembangan Kebudayaan 17. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 18. Program Pembinaan Sejarah 19. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	11.911.914.870
3.	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan Regional 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan	94.028.750.981

No	Sasaran	Program	Anggaran Tahun 2025
		Sistem Air Limbah 10. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 11. Program Penyelenggaraan Jalan 12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 13. Program Pengelolaan Pelayaran 14. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 5. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Penanggulangan Bencana	31.251.754.718
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 11. Program Pelayanan Penanaman Modal 12. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.443.520.950

No	Sasaran	Program	Anggaran Tahun 2025
		17.Program Pemasaran Pariwisata 18.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 19.Program Penempatan Tenaga Kerja 20.Program Hubungan Industrial	
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 10.Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 11.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 12.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 13.Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 14.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 15.Program Peningkatan Kerjasama Desa 16.Program Administrasi Pemerintahan Desa 17.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 18.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 19.Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 20.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.398.101.988
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan 4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 7. Program Informasi dan Komunikasi Publik 8. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 9. Program Pendaftaran Penduduk 10.Program Pencatatan Sipil 11.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 13.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	339.303.538.349,18

No	Sasaran	Program	Anggaran Tahun 2025
		Non Kebakaran 14.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 15.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 16.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 17.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 18.Program Pengelolaan Keuangan Daerah 19.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 20.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 21.Program Kepegawaian Daerah 22.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 23.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 24.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 25.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 26.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 27.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28.Program Penyelenggaraan Pengawasan 29.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan, Taraf Pendidikan dan Kesempatan Belajar Masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	%	78
		Indeks Pendidikan Daerah	%	67,1

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Kapasitas Modal Sosial dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	91
		Indeks Ketahanan Sosial	%	70,5
3	Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	81,88
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ruang Wilayah, Lingkungan Hidup, serta Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	73,76
5	Meningkatnya Transformasi Struktural dan Daya Saing Sektor Unggulan melalui Investasi Produktif yang Memperluas Kesempatan Kerja Layak	Pertumbuhan Investasi PMTB	%	7
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan Dan Kelautan	%	6,57
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	2,3
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,7
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Efektifitas Pengentasan Kemiskinan melalui Usaha-usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	50
		Tingkat Kemiskinan	%	4,5
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Inovasi yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin/Tahun)	%	12,97
		Nilai Reformasi Birokrasi	%	60,2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah Tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,5,6,7	57,14
2	Baik (B)	2,3	28,57
3	Cukup (C)	4	14,29
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		7	100

3.2. EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2025 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 11
Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2025

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)

No	Jumlah Nilai	Kategori
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 12
Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2025

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1,2,3,5,6,7	85,71
2	Efisien (E)	4	14,29
3	Kurang Efisien (KE)	-	-
4	Tidak Efisien (TE)	-	-
Jumlah		7	100

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 dinilai **Sangat Efisien (SE)**. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Tabel 13
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan, Taraf Pendidikan dan Kesempatan Belajar	Indeks Kesehatan Daerah	%	78	80,46	103,15
		Indeks Pendidikan Daerah	%	67,1	67,83	101,09

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat					
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Kapasitas Modal Sosial dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	91	90,91	99,9
		Indeks Ketahanan Sosial	%	70,5	59,03	83,73
3	Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	81,88	81,09	99,04
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ruang Wilayah, Lingkungan Hidup, serta Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	73,76	51,99	70,49
5	Meningkatnya Transformasi Struktural dan Daya Saing Sektor Unggulan melalui Investasi Produktif yang Memperluas Kesempatan Kerja Layak	Pertumbuhan Investasi PMTB	%	7	45,38	648,29
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan Dan Kelautan	%	6,57	3,91	59,51
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	2,3	4,58	199,13
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58	18,2	144,67
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,7	6,7	82,46
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Melalui Usaha-usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	50	82,56	165,12
		Tingkat Kemiskinan	%	4,5	4,35	103,33
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Inovasi yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin/Tahun)	%	12,97	20,09	154,9
		Nilai Reformasi Birokrasi	%	60,2	59,75	99,25

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN, TARAF PENDIDIKAN DAN KESEMPATAN BELAJAR MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang diurus oleh 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil pengukuran menunjukkan 2 (dua) indikator memiliki capaian kinerja **Baik**

Sekali dengan persentase 102,12%.

Tabel 14
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	2022	2023	2024			2025			Perbandingan Tahun 2024 - 2025		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Kesehatan Daerah	76,73	77,09	78,72	77,46	98,40	78	80,46	103,15	4,75	3	78,99
2	Indeks Pendidikan Daerah	66,73	66,83	74,27	66,93	90,12	67,1	67,83	101,09	10,97	0,9	76,33
Rata-Rata									102,12			

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Kesehatan Daerah

Indeks Kesehatan Daerah adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks Kesehatan Daerah dibentuk oleh Usia Harapan Hidup (UHH), Usia Harapan Hidup Maksimal (UHHMax) dan Usia Harapan Hidup Minimal (UHHMin). Ketiga indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas Kesehatan masyarakat di Halmahera Utara. Usia Harapan Hidup (UHH) dapat didefinisikan sebagai Harapan Umur Kehidupan (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh setiap orang sampai diusia 69,88 Tahun dari Angka Harapan Hidup Maksimal (AHHMax) 85 Tahun sedangkan Usia Harapan Hidup Minimal (UHHMin) adalah 20 Tahun. UHH dapat digunakan untuk mengetahui Indeks Kesehatan Masyarakat di Halmahera Utara. Berikut Data Angka Harapan Hidup kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2023-2025.

Tabel 15
Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota (Tahun)

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2023	2024	2025
Halmahera Barat	70,46	70,72	71,11
Halmahera Tengah	70,19	70,48	70,9
Kepulauan Sula	68,54	68,8	69,19
Halmahera Selatan	70,25	70,54	70,98
Halmahera Utara	71,74	71,95	72,3
Halmahera Timur	71,36	71,7	72,04
Pulau Morotai	70,81	71,16	71,63
Pulau Taliabu	67,04	67,25	67,52
Ternate	72,55	72,87	73,36
Tidore Kepulauan	72,2	72,52	73
Maluku Utara	70,76	71,05	71,47
Indonesia	72,13	72,39	74,53

Tabel 16
Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

Wilayah	Indeks Kesehatan Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2025			Peringkat
	2023	2024	2025	
Halmahera Barat	77,43	78,03	78,63	7
Halmahera Tengah	77,21	77,66	78,30	10
Kepulauan Sula	74,67	75,07	75,67	9
Halmahera Selatan	77,30	77,75	78,43	8
Halmahera Utara	79,60	79,92	80,46	3
Halmahera Timur	79,01	79,53	80,06	4
Pulau Morotai	78,16	78,70	79,43	5
Pulau Taliabu	72,63	72,69	73,10	11
Ternate	80,84	81,33	82,09	1
Tidore Kepulauan	80,30	80,80	81,53	2
Maluku Utara	78,09	78,53	79,18	6
Indonesia	80,2	80,6	84,04	

Untuk Tahun 2025 Realisasi Indeks Kesehatan Daerah sebesar 80,46 (103,15%) dari target yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar 78 dari hasil tersebut maka pencapaian Indeks Kesehatan Daerah Tahun 2025 melebihi target 2,46 dari target yang ditetapkan. Dapat dilihat di Grafik berikut:

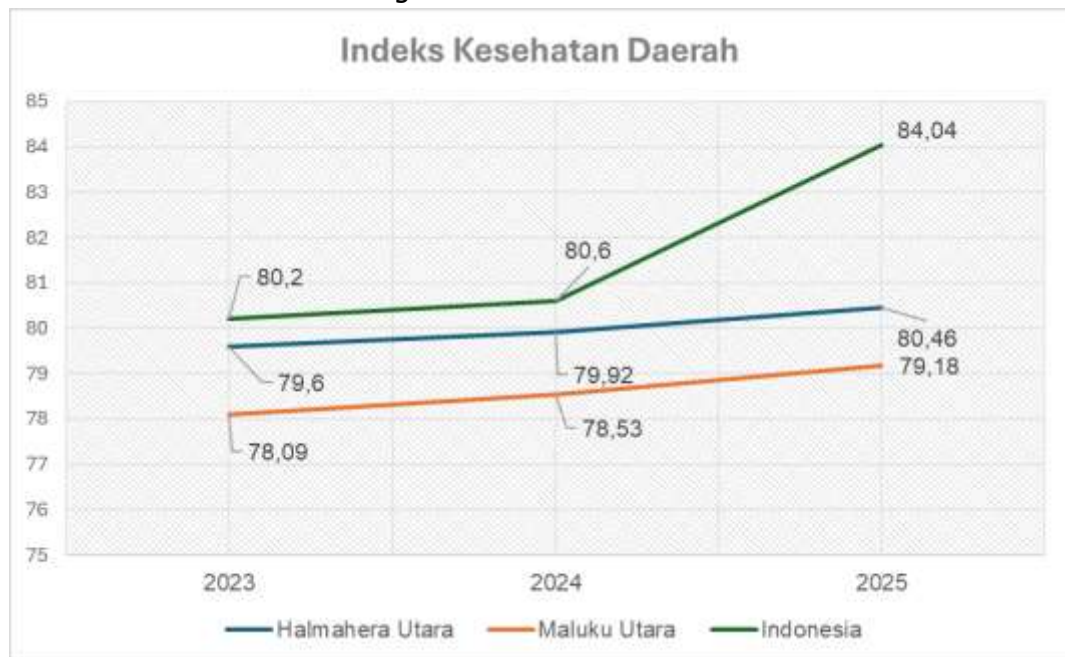
Gambar 3
Grafik Indeks Kesehatan Daerah



Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 71,19 maka capaian kinerja telah melebihi target jangka menengah sebesar 9,27 poin. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 79,92 maka Indeks Kesehatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,54 poin artinya realisasi Tahun 2025 lebih tinggi dari Tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan

realisasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebesar 79,18 maka realisasi Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 lebih tinggi sebesar 1,28 poin. Dibandingkan dengan Capaian Nasional (Indonesia) Tahun 2025 sebesar 84,04, maka IKD Halmahera Utara lebih rendah 3,58 poin. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Kesehatan Daerah sudah melebihi target.

Gambar 4
Grafik Perbandingan Indeks Kesehatan Daerah



Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKD diantaranya:

1. Telah terakreditasinya 19 puskesmas di Kabupaten Halmahera utara pada Tahun 2025 dengan Kategori Paripurna berjumlah 3 Puskesmas (Tobelo, Toliwang dan Malifut), Utama 9 Puskesmas (Pitu, Bobaneigo, Dum-Dum, Kao, Daru, Kusuri, Galela, Soakonora dan Salimuli) dan Madya berjumlah 7 Puskesmas (Kupa-Kupa, Mawea, Gorua, Dokulamo, Dorume, Dama dan Supu).
2. Telah terjadi peningkatan status RSUD Tobelo dari Tipe C ke Tipe B.
3. Menurunnya Rasio Kematian Bayi dimana Tahun 2024 terdapat kematian neonatal sebanyak 37 neonatal dari 2966 bayi lahir hidup atau AKN 12/1.000 kelahiran hidup, sedangkan di Tahun 2025 terdapat kematian neonatal sebanyak 33 neonatal dari 3048 bayi lahir hidup atau AKN 11/1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal masih dibawah target nasional yaitu 16/1.000.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Kesehatan akan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan cara:

1. Peningkatan sarana prasarana pelayanan termasuk penyediaan kebutuhan obat-obatan di semua unit pelayanan (RSUD dan 19 Puskesmas).

2. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program di puskesmas.

2. Indeks Pendidikan Daerah

Keunggulan pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya capaian Indeks Pendidikan Daerah, karena Indeks Pendidikan Daerah merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pendidikan Daerah dibentuk oleh angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan rata-rata Lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah Tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah sebesar 13,81 Tahun (Source Url: <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYxIzI=/harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-Tahun-.html>). Jika dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah sebesar 13,69 tahun, maka ada kenaikan sebesar 0,12 poin (0,87%) dan sudah berada pada urutan ke-3 dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara atau naik satu peringkat dari Tahun 2024.

Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 adalah sebesar 8,84 tahun, sedangkan Tahun 2024 adalah sebesar 8,67 tahun. (Source Url: <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota--Tahun-.html>), atau mengalami kenaikan sebesar 0,17 poin (1,92%) dan masih tetap berada pada urutan ke-6 dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara.

Berdasarkan data RLS dan HLS, maka dapat dihitung Indeks Pendidikan Daerah (IPD) untuk Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2025 yaitu sebesar 67,83. Ini berarti bahwa 67,83% penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada usia 24 tahun keatas telah ada pada tingkat pendidikan antara SMP kelas 2 dan kelas 3 (RLS 8,84 tahun) dengan harapan lama sekolah 13,81 tahun. Jika dilihat target IPD Tahun 2025 yaitu sebesar 67,10 maka capaian telah melebihi target sebesar 0,73 poin atau sebesar 1,08%. Jika dibandingkan dengan IPD Tahun 2024 adalah sebesar 66,93% maka di Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,9 poin atau sebesar 1,33%. Jika kita melihat realisasi IPD sejak Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 maka setiap tahun hanya mengalami kenaikan sebesar antara 0,10 poin sampai dengan 0,19 poin maka di Tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu 0,9 poin. Jika dibandingkan dengan 10 Kabupaten/Kota di Maluku

Utara maka Indeks Pendidikan Daerah Halmahera Utara masih tetap berada di peringkat ke-4 dari Kota Ternate, Kota Tidore, serta Kabupaten Halmahera Tengah dan masih dibawah Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara yaitu 69,89%. Tetapi lebih tinggi 0,65 poin dari IPD Nasional yaitu 67,18% (Tabel 17). Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 76,33%, maka Indeks Pendidikan Daerah (IPD) belum mencapai target RPJMD, dan masih memiliki selisih rendah sebesar 8,5 poin.

Tabel 17
RLS, HLS, DAN IPD TAHUN 2025

Wilayah	RLS	HLS	IRLS	IHLS	IPD	Peringkat
Halmahera Barat	8,6	13,26	57,33	73,67	65,50	VI
Halmahera Tengah	9,21	13,69	61,40	76,06	68,73	III
Kepulauan Sula	9,2	13,16	61,33	73,11	67,22	V
Halmahera Selatan	8,43	13,05	56,20	72,50	64,35	VIII
Halmahera Utara	8,84	13,81	58,93	76,72	67,83	IV
Halmahera Timur	9,07	13,01	60,47	72,28	66,37	VII
Pulau Morotai	7,91	13,19	52,73	73,28	63,01	IX
Pulau Taliabu	8,15	12,89	54,33	71,61	62,97	X
Ternate	12,09	15,93	80,60	88,50	84,55	I
Tidore Kepulauan	10,18	14,5	67,87	80,56	74,21	II
Maluku Utara	9,5	13,76	63,33	76,44	69,89	
INDONESIA	9,07	13,3	60,4667	73,89	67,18	

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IPD diantaranya adalah Rendahnya Angka Rata-rata Lama sekolah, hal ini dapat disebabkan karena masih ada masyarakat yang putus sekolah/tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 untuk Sekolah Dasar (SD) adalah 95,94 ini berarti masih ada sekitar 4,06% anak SD (Usia 7-12 tahun) tidak bersekolah pada jenjang SD, untuk APM Sekolah Menengah Pertama adalah 77,58 (Source Url: <https://halutkab.bps.go.id/indicator/162/63/1/angka-partisipasi-murni-apm-.html>).

APM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 untuk Sekolah Dasar (SD) adalah 96,31 ini berarti masih ada sekitar 3,69% anak SD (Usia 7-12 tahun) tidak bersekolah pada jenjang SD, Untuk APM Sekolah Menengah Pertama adalah 80,25 (Source Url: <https://halutkab.bps.go.id/indicator/162/63/1/angka-partisipasi-murni-apm-.html>).

Ini memberikan gambaran bahwa masih ada kurang lebih 19,75% anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP atau menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat SMP belum dirasakan oleh seluruhnya anak usia 13-15 tahun (19.75%). Terdapat banyak faktor penyebab mengapa masih ada anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah, terutama di beberapa desa yang Fasilitas Pendidikan (sekolah SMP) masih berada di pusat kecamatan sehingga

membutuhkan biaya transportasi ataupun karena faktor keterbatasan ekonomi orang tua dalam hal pembiayaan perlengkapan sekolah (pakaian seragam, buku dan iuran komite) menyebabkan putus sekolah.

Dilihat realisasi IPD sampai Tahun ke-5 akhir tahun RPJMD yang belum mencapai target RPJMD, disebabkan karena nilai yang ditargetkan terlalu tinggi, hal ini karena dalam penentuan target tidak mempertimbangkan realisasi Tahun sebelumnya.

Melihat masih banyak komponen Pendukung pencapaian IPD yang harus menjadi perhatian, maka dibutuhkan berbagai upaya untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat;
- Memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu;
- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun keatas (Paket C);
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada jenjang pendidikan dasar melalui pembangunan infrastruktur terutama SMP pada lokasi yang tepat sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat desa terpencil;
- pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pusat untuk memberikan bantuan Dana bagi siswa yang kurang mampu.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat Tahun 2025 melalui 8 (delapan) program antara lain:

Tabel 18
Pagu Anggaran dan Realisasi Program

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85.048.629.341	74.590.883.052	87,70%
	RSUD Tobelo		27.483.658.819	11.307.716.751	41,1%
	RSUD Tobelo (BLUD)		65.000.000.000	114.732.920.547	176,5%
2	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.830.318.508	3.379.040.194	70,0%
	RSUD Tobelo		5.854.126.312	1.472.285.789	25,15%
3	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	654.156.000	595.372.000	91,0%
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	603.800.000	213.200.000	35,31%
5		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.094.601.400	1.798.860.400	58,13%
6		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KA)	1.959.091.800	1.003.086.450	51,20%
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	85.471.073.490	40.355.073.679	47,21%
8		Program Pendidik dan Tenaga	239.985.000	239.985.000	100%

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Kependidikan			
Jumlah			274.385.314.358	248.216.138.073	90,46%

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut Rp 274.385.314.358,- terealisasi sebesar Rp 248.216.138.073,- atau sebesar 90,46%. Nilai efisiensi capaian dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 102,12% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,46% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **112,89%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 2 MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER SERTA KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang diusung oleh oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Hasil pengukuran menunjukkan 2 (dua) indikator memiliki capaian Kinerja **Baik** dengan persentase **91,82%**.

Tabel 19
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	2022	2023	2024			2025			Perbandingan Tahun 2024 - 2025		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender	89,73	90,03	89,85	90,25	100,45	91	90,91	99,9	-0,55	0,66	90,02
2	Indeks Ketahanan Sosial	67,05	68,66	70	69,47	99,24	70,5	59,03	83,73	-15,51	-10,44	75,5
Rata-Rata									91,82			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Dimana Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesenjangan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki

yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan Perempuan.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 20
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2025

NO	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Halmahera Barat	88.48	88.89	89.12	89.30	89.59
2	Halmahera Tengah	89.78	90.18	90.46	90.6	90.78
3	Kepulauan Sula	92.36	92.77	92.85	93.19	93.58
4	Halmahera Selatan	87.30	87.38	87.58	87.79	87.92
5	Halmahera Utara	89.35	89.73	90.03	90.25	90.91
6	Halmahera Timur	81.56	82.09	82.59	82.69	83.04
7	Pulau Morotai	69.75	70.85	71.58	72.61	72.97
8	Pulau Taliabu	83.29	83.81	84.51	84.93	85.34
9	Kota Ternate	91.87	92.28	92.37	92.24	92.79
10	Kota Tidore Kepulauan	95.84	96.04	96.34	96.59	97.01
11	MALUKU UTARA	89.75	90.3	90.59	90.91	91.12
12	INDONESIA	91.27	91.63	91.85	91.85	91.85

Sumber Data: <https://malut.bps.go.id/indicator/26/254/1/angka-harapan-hidup-Tahun-.html>

Berdasarkan data dari BPS, realisasi angka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2025 sebesar 90,91 dari target yang ditetapkan sebesar 91, dengan kata lain belum tercapai dengan selisih 0,9 (0,54%). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 90,25 (100,45%) maka IPG Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,66. Apabila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Maluku Utara sebesar 91,12 maka IPG Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah 0,21 dan jika dibandingkan dengan realisasi

Nasional sebesar 91,85 maka IPG kabupaten Halmahera Utara lebih rendah 0,94. Data menunjukkan terjadi penurunan dari Realisasi Nasional pada Tahun 2024 sebesar 0,88. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan perempuan di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2025 masih berada dibawah laki-laki. Meskipun demikian perkembangan IPG di Kabupaten Halmahera Utara selama 5 tahun terakhir mengalami tren yang meningkat. Namun masih dibawah Capaian Provinsi Maluku Utara dan capaian IPG secara Nasional.

Gambar 5



Kabupaten Halmahera Utara masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berikut data berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin, Rata Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 21
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023-2025

Nasional Provinsi/Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Halmahera Barat	13.21	13.22	13.23	13.31	13.32	13.33
Halmahera Tengah	13.15	13.46	13.72	13.3	13.59	13.60
Kepulauan Sula	13.00	13.01	13.22	12.96	12.98	13.16
Halmahera Selatan	13.18	13.19	13.2	12.9	12.91	12.92
Halmahera Utara	13.79	13.80	13.81	13.55	13.56	13.74
Halmahera Timur	13.11	13.28	13.54	12.82	12.83	12.95
Pulau Morotai	13.00	13.01	13.19	12.98	13.10	13.11
Pulau Taliabu	12.51	12.66	12.79	13.10	13.11	13.12
Kota Ternate	15.66	15.94	15.95	15.91	15.92	15.93
Kota Tidore Kepulauan	14.2	14.21	14.22	15.17	15.18	15.33
MALUKU UTARA	13.75	13.77	13.81	13.74	13.75	13.76
INDONESIA	12.98	12.99	13.16	13.33	13.39	13.46

Sumber Data: Data BPS Tahun 2023-2025

Data menunjukan Angka Harapan Lama sekolah berdasarkan jenis kelamin mengalami pertumbuhan baik pada Laki-laki maupun Perempuan, namun kenaikan terjadi lebih besar pada perempuan Tahun 2024 ke 2025 sebesar 0,18 poin disajikan sebagai berikut:

Gambar 6
Grafik Angka Harapan Lama Sekolah Laki-laki



Gambar 7
Grafik Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan



Tabel 22
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023-2025

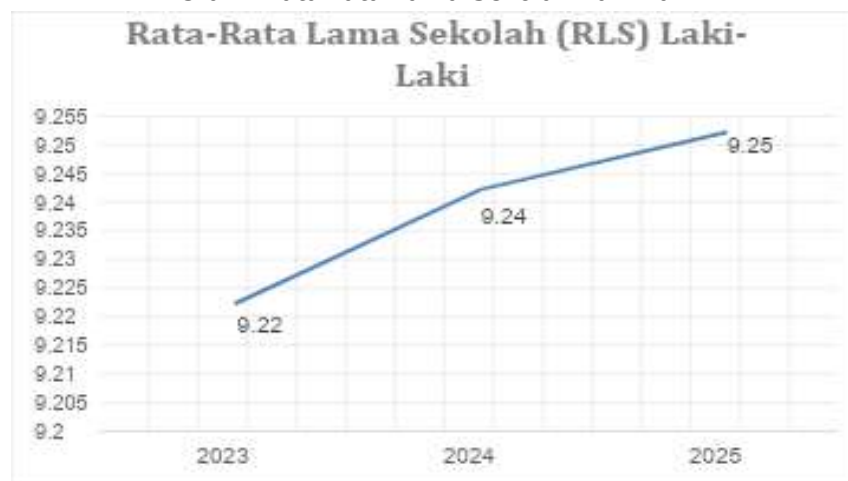
Nasional Provinsi/Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Halmahera Barat	9.09	9.10	9.11	8.41	8.42	8.52
Halmahera Tengah	9.55	9.56	9.57	9.02	9.03	9.04

Nasional Provinsi/Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
Kepulauan Sula	9.39	9.51	9.58	8.89	9.16	9.17
Halmahera Selatan	8.54	8.79	8.80	7.82	8.08	8.09
Halmahera Utara	9.22	9.24	9.25	8.25	8.36	8.57
Halmahera Timur	9.09	9.34	9.35	8.42	8.62	8.84
Pulau Morotai	8.03	8.17	8.37	7.08	7.27	7.43
Pulau Taliabu	8.33	8.34	8.46	7.76	7.83	8.01
Kota Ternate	12.34	12.35	12.36	11.70	11.71	11.83
Kota Tidore Kepulauan	10.48	10.50	10.51	9.81	10.01	10.09
MALUKU UTARA	9.52	9.60	9.69	9.01	9.14	9.30
INDONESIA	9.07	9.17	9.35	8.48	8.54	8.79

Sumber Data: Data BPS Tahun 2023-2025

Data menunjukkan Rata-Rata Lama sekolah (RLS) berdasarkan jenis kelamin mengalami pertumbuhan baik pada Laki-laki maupun Perempuan, namun kenaikan terjadi lebih besar pada perempuan Tahun 2024 ke 2025 sebesar 0,21 poin sedangkan laki-laki sebesar 0,01 poin. Dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 8
Grafik Rata-rata Lama Sekolah Laki-Laki



Gambar 9
Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan



Tabel 23

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)

Nasional Provinsi/Kabupaten/ Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Halmahera Barat	11591	12130	12130	6235	6521	6521
Halmahera Tengah	11991	12643	12643	6861	7220	7220
Kepulauan Sula	10382	10796	10796	7231	7506	7506
Halmahera Selatan	11886	12371	12371	5995	6235	6235
Halmahera Utara	12215	12978	12978	7232	7627	7627
Halmahera Timur	13400	13802	13802	4793	4977	4977
Pulau Morotai	11665	12281	12281	2650	2799	2799
Pulau Taliabu	12037	12408	12408	4734	4963	4963
Kota Ternate	18721	19625	19625	10990	11545	11545
Kota Tidore Kepulauan	10699	10987	10987	8598	8812	8812
MALUKU UTARA	13274	13965	13965	7500	7903	7903
INDONESIA	16736	17345	17345	9579	9922	9922

Sumber Data: Data BPS Tahun 2023-2025

Data menunjukkan Pengeluaran Perkapita berdasarkan jenis kelamin mengalami pertumbuhan di Tahun 2024 baik laki-laki maupun perempuan dan pada Tahun 2025 tidak mengalami pertumbuhan. Dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 10
Grafik Pengeluaran per Kapita Laki-laki



Gambar 11
Grafik Pengeluaran per Kapita Perempuan



Data menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami kesenjangan, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita masih terdapat kesenjangan dan perlu menjadi perhatian ke depan.

Data Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara jika dihubungkan dengan IPG maka Jumlah Anggota DPRD Kabupaten sebanyak 30 Orang terdiri dari 20 Laki-laki dan 10 Perempuan dengan Grafik sebagai berikut:

Gambar 12
Grafik Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara



Indeks Pembangunan Gender (IPG) di di Maluku Utara pada Tahun 2025 Halmahera Utara menempati posisi kelima dengan nilai IPG yang mencapai sebesar 90,91. Capaian nilai IPG yang mendekati angka 100 tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan gender sudah cukup rendah

di Halmahera Utara, dan capaian tersebut masih dapat ditingkatkan lagi.

Upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan mewujudkan pembangunan manusia yang berfokus pada kesetaraan gender itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Gender.

Karena itu dibutuhkan kerja untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- a. Peningkatan Pendidikan baik Formal maupun Non Formal bagi Perempuan (Pelatihan)
- b. Pemberdayaan Ekonomi melalui pengembangan usaha mikro bagi perempuan
- c. Meningkatkan Upaya Kesehatan Perempuan

2. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial). Dimana Indeks Ketahanan Sosial merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Desa (ID).

Indikator peningkatan sosial adalah ukuran yang menggambarkan kemajuan dalam pencapaian tujuan kebijakan sosial. Indikator sosial dapat digunakan untuk memantau kesejahteraan individu atau komunitas, memantau kemajuan memerangi kemiskinan, memantau kemajuan dalam meningkatkan lapangan kerja, memantau kemajuan dalam meningkatkan kondisi hidup dalam kerja, memantau kemajuan memerangi dalam pengucilan dan memantau kemajuan dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa (ID) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans. Realisasi Indeks Ketahanan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2025 sebesar 59,03 (83,73%) dari target 70,5. Mengalami penurunan dari tahun 2024 dengan realisasi sebesar 69,47 (99,24%) dari target sebesar 70. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,5 maka terdapat selisih sebesar 16,02 poin. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 13
Grafik Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Halmahera Utara



Sumber Data: Data Kemendes 2025 yang diolah Oleh Tim LkjIP

Tabel 24
Indeks Ketahanan Sosial Per-Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Desa Menurut Kategori ID 2025				Indeks Ketahanan Sosial
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
Malifut	-	-	22	-	61,86
Kao Teluk	-	1	10	1	64,09
Kao	-	-	12	2	51,50
Kao Barat	-	1	8	12	54,29
Kao Utara	1	5	4	2	65,25
Tobelo Selatan	-	-	13	-	62,85
Tobelo Barat	-	-	4	1	59,20
Tobelo Timur	-	2	3	1	52,00
Tobelo	6	3	1	-	71,30
Tobelo Tengah	2	6	1	-	52,44
Tobelo Utara	-	-	8	2	57,80
Galela	-	4	3	-	63,29
Galela Selatan	-	3	4	-	60,14
Galela Barat	-	6	3	-	51,33
Galela Utara	-	2	10	-	61,00
Loloda Utara	-	1	10	7	58,56
Loloda Kepulauan	-	-	5	5	56,60
Halmahera Utara	9	34	121	32	1003,50
					59,03

Sumber Data: Data Kemendes 2025 yang diolah Tim LKjIP

Dari hasil diatas dapat disimpulkan Indeks Desa sangat dipengaruhi oleh 6 dimensi (Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, Tata Kelola Pemerintahan Desa) dan terdapat 9 Desa Mandiri, 34 Desa Maju, 121 Desa Berkembang dan 32 Desa tertinggal Jika dibandingkan dengan tahun 2024 masih menggunakan 3 dimensi (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) dengan Capaian 6 Desa Mandiri, 23 Desa Maju, 117 Desa Berkembang dan 50 Desa Tertinggal.

Upaya membangun Desa Mandiri (Swadaya) perlu peningkatan skor capaian di berbagai

sub dimensi yang membentuk Indeks Ketahanan Sosial. Dimana Realisasi Indeks Ketahanan Sosial (IKS) pada tahun 2025 sebesar 59,03 dibandingkan tahun 2024 sebesar 69,47 maka terjadi penurunan realisasi sebesar -10,44. Data tersebut sejalan dengan jumlah desa dengan Indeks Ketahanan Sosial di bawah 60 sebanyak 59 Desa yang terdiri dari 1 Desa dalam kategori Maju, 39 Desa dalam Kategori Berkembang dan 19 Desa dalam Kategori Desa Tertinggal. Hal ini disebabkan menurunnya kualitas hasil survei Indeks Desa yang mempengaruhi dimensi Kearifan Sosial, Kebiasaan/Frekuensi Gotong Royong, Kegiatan Olahraga, Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial, Siskamling, Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa, Fasilitas Olahraga dan Keberadaan Ruang Publik Terbuka.

Tabel 25
Data Desa dengan Dimensi Sosial sesuai dengan IKS Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Dimensi Sosial	Status IDM 2024	Total Skor ID (%)	Status Indeks Desa 2025 SOP Kemendes	Versi SOP Kemendes
1	Tobelo Timur	Yaro	55	Maju	0.724409449	Maju	Sama
2	Tobelo Selatan	Tobe	53	Berkembang	0.639370079	Berkembang	Sama
3	Tobelo Selatan	Talaga Paca	55	Berkembang	0.640944882	Berkembang	Sama
4	Kao	Kao	36	Berkembang	0.620472441	Berkembang	Sama
5	Kao	Jati	53	Maju	0.640944882	Berkembang	Turun 1
6	Kao	Kusu	55	Berkembang	0.609448819	Berkembang	Sama
7	Kao	Waringin Lelewi	58	Berkembang	0.645669291	Berkembang	Sama
8	Kao	Soa Sangaji Dim-Dim	58	Berkembang	0.622047244	Berkembang	Sama
9	Kao	Biang	41	Berkembang	0.647244094	Berkembang	Sama
10	Kao	Kukumutuk	43	Berkembang	0.622047244	Berkembang	Sama
11	Kao	Goruang	51	Berkembang	0.596850394	Berkembang	Sama
12	Kao	Kusu Lofra	54	Berkembang	0.581102362	Berkembang	Sama
13	Kao	Sumber Agung	40	Berkembang	0.584251969	Berkembang	Sama
14	Malifut	Tahane	58	Berkembang	0.65511811	Berkembang	Sama
15	Malifut	Talapao	38	Tertinggal	0.612598425	Berkembang	Naik 1
16	Loloda Utara	Ngajam	52	Tertinggal	0.57480315	Berkembang	Naik 1
17	Loloda Utara	Tate	52	Tertinggal	0.582677165	Berkembang	Naik 1
18	Tobelo Utara	Popilo	40	Maju	0.601574803	Berkembang	Turun 1
19	Tobelo Timur	Meti	55	Berkembang	0.634645669	Berkembang	Sama
20	Tobelo Timur	Katana	51	Berkembang	0.622047244	Berkembang	Sama
21	Tobelo Barat	Sukamaju	54	Tertinggal	0.65511811	Berkembang	Naik 1
22	Galela Barat	Makete	46	Berkembang	0.65984252	Berkembang	Sama
23	Galela Barat	Roko	30	Berkembang	0.65511811	Berkembang	Sama
24	Galela Barat	Kira	57	Berkembang	0.633070866	Berkembang	Sama
25	Galela Utara	Tutumaloleo	56	Berkembang	0.637795276	Berkembang	Sama
26	Galela Utara	Dodowo	58	Berkembang	0.648818898	Berkembang	Sama
27	Galela Utara	Togasa	39	Berkembang	0.620472441	Berkembang	Sama
28	Galela Selatan	Togawa	56	Berkembang	0.662992126	Berkembang	Sama
29	Galela Selatan	Igobula	43	Berkembang	0.644094488	Berkembang	Sama
30	Galela Selatan	Togawabesi	56	Berkembang	0.656692913	Berkembang	Sama
31	Loloda Kepulauan	Salube	55	Tertinggal	0.664566929	Berkembang	Naik 1
32	Loloda Kepulauan	Dama	59	Tertinggal	0.661417323	Berkembang	Naik 1
33	Loloda Kepulauan	Tuakara	55	Tertinggal	0.587401575	Berkembang	Naik 1
34	Loloda Kepulauan	Cera	53	Tertinggal	0.576377953	Berkembang	Naik 1
35	Kao Utara	Wateto	52	Berkembang	0.607874016	Berkembang	Sama
36	Kao Utara	Gulo	53	Berkembang	0.677165354	Berkembang	Sama
37	Kao Barat	Tolabit	53	Berkembang	0.615748031	Berkembang	Sama
38	Kao Barat	Wonosari	47	Berkembang	0.645669291	Berkembang	Sama

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Dimensi Sosial	Status IDM 2024	Total Skor ID (%)	Status Indeks Desa 2025 SOP Kemendes	Versi SOP Kemendes
39	Kao Barat	Beringin Agung	59	Berkembang	0.631496063	Berkembang	Sama
40	Kao Teluk	Tobanoma	45	Berkembang	0.6	Berkembang	Sama
41	Kao	Waringin Lamo	42	Berkembang	0.573228346	Tertinggal	Turun 1
42	Loloda Utara	Doitia	42	Tertinggal	0.538582677	Tertinggal	Sama
43	Loloda Utara	Gisik	43	Tertinggal	0.521259843	Tertinggal	Sama
44	Loloda Utara	Momoiu	54	Tertinggal	0.566929134	Tertinggal	Sama
45	Tobelo Timur	Gonga	47	Berkembang	0.566929134	Tertinggal	Turun 1
46	Loloda Kepulauan	Dowonggila	55	Tertinggal	0.563779528	Tertinggal	Sama
47	Loloda Kepulauan	Jikolamo	56	Tertinggal	0.527559055	Tertinggal	Sama
48	Loloda Kepulauan	Fitako	53	Tertinggal	0.566929134	Tertinggal	Sama
49	Loloda Kepulauan	Tobo Tobo	53	Tertinggal	0.533858268	Tertinggal	Sama
50	Kao Utara	Boulamo	57	Tertinggal	0.565354331	Tertinggal	Sama
51	Kao Barat	Gaga Apok	42	Tertinggal	0.559055118	Tertinggal	Sama
52	Kao Barat	Momoda	51	Tertinggal	0.530708661	Tertinggal	Sama
53	Kao Barat	Leleseng	59	Tertinggal	0.549606299	Tertinggal	Sama
54	Kao Barat	Tuguis	55	Tertinggal	0.54015748	Tertinggal	Sam
55	Kao Barat	Parseba	46	Tertinggal	0.529133858	Tertinggal	Sama
56	Kao Barat	Kai	59	Tertinggal	0.541732283	Tertinggal	Sama
57	Kao Barat	Toboulamo	54	Tertinggal	0.516535433	Tertinggal	Sama
58	Kao Barat	Takimo	46	Tertinggal	0.532283465	Tertinggal	Sama
59	Kao Barat	Torawat	58	Berkembang	0.530708661	Tertinggal	Turun 1

Upaya-upaya peningkatan Ketahanan Sosial dapat dimulai dari penguatan modal sosial masyarakat, nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan kepercayaan antar warga merupakan fondasi yang menentukan kuat atau lemahnya struktur sosial suatu desa dengan cara Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Survey Indeks Desa yang terhubung mulai dari Kabupaten sampai desa;

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat Tahun 2025 melalui 19 (sembilan belas) program antara lain:

Tabel 26
Pagu Anggaran dan Realisasi Program

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	322,375,800	320,495,800	99.42
2		Program Perlindungan Perempuan	238,229,800	210,679,000	88.44
3		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	311,059,000	120,254,580	38.66
4		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	156,483,000	108,140,000	69.11
5		Program Perlindungan Khusus Anak	438,195,800	200,712,489	45.80

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	72,878,000	72,878,000	100.00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	230,000,000	50,000,000	21.74
8		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,633,827,000	2,568,418,000	97.52
9	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	64,360,000	-	-
10		Program Rehabilitasi Sosial	473,140,000	-	-
11		Program Penanganan Bencana	200,000,000	-	-
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,927,853,870	1,882,847,670	97.67
13		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,499,633,000	3,339,573,000	95.43
14		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	74,706,600	58,432,600	78.22
15		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	627,056,000	599,926,000	95.67
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	293,802,000	87,554,200	29.80
17		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	99,808,000	18,530,000	18.57
18		Program Pembinaan Sejarah	99,976,000	68,109,000	68.13
19		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	148,531,000	77,129,000	51.93
Jumlah			11.911.914.870	9.783.679.339	82.13

Pagu anggaran untuk mendukung program Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketahanan Sosial yang tersebar pada 6 Perangkat Daerah sebesar Rp 11.911.914.870 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.783.679.339 dengan persentase 82,13%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 91,82% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 82,13% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **111,79%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERJANGKAUAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG EKONOMI

Sasaran strategis 3 diukur dengan 1 (satu) Indikator yang dilaksanakan oleh 5 (lima)

Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hasil pengukuran menunjukkan 1 indikator memiliki capaian Kinerja **Baik** dengan persentase **99,04%**.

Tabel 27
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	2022	2023	2024			2025			Perbandingan Tahun 2024 - 2025		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,72	78,44	79,36	74,61	94,01	81,88	81,09	99,04	5,03	6,48	84,98

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025 sebesar 81,09% dengan capaian 99,04%, jika dibandingkan dengan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 94,01% maka mengalami peningkatan yaitu 5,03%. Jika membandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target sebesar 84,98% maka Indeks Pembangunan Infrastruktur belum mencapai target yang ditetapkan, namun jika dilihat dari realisasi Tahun 2022 sampai Tahun 2025 maka capaian indeks pembangunan infrastruktur menunjukkan tren kenaikan meskipun belum memenuhi target akhir RPJMD.

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan gambaran untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup, serta Tujuan 2 yaitu Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim.

Indeks Pembangunan Infrastruktur untuk mengukur capaian sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur wilayah penunjang konektivitas dan ekonomi di Halmahera Utara.

Indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur antara lain : (1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen); (2) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen); (3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen); (4) Persentase rumah tangga menggunakan listrik; (5) Proporsi panjang jalan

kabupaten dalam kondisi mantap (persen); (6) Rasio konektivitas transportasi wilayah (persen); dan (7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen).

(1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)

Rumah tinggal layak huni merupakan tempat tinggal yang mempunyai standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan, kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Sehingga Dengan mencapai kriteria untuk tempat tinggal yang sesuai, baik individu maupun keluarga dapat merasakan keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta perlindungan yang memadai. Semua hal ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan secara menyeluruh dalam kualitas hidup. Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal layak huni terhadap jumlah rumah seluruhnya. Realisasi rumah tinggal layak huni Tahun 2025 mencapai sebesar 96,03 % atau sebanyak 46.227 unit rumah layak huni dibandingkan total rumah pada Tahun 2025 sebanyak 48.138 rumah. Realisasi Tahun 2025 meningkat sebanyak 6.171 rumah jika dibandingkan dengan realisasi 40.056 rumah Tahun 2024.

(2) Cakupan Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya, khususnya pada Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP). Realisasi pada Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih sampai tahun 2025 mencapai (56,09%) atau sebanyak 28.919 rumah tangga yang memiliki akses air bersih dari total 51.558 rumah tangga. Pada Tahun 2025 dilakukan pembangunan SPAM JP di Desa Gura Kecamatan Tobelo untuk 200 rumah tangga, sehingga untuk jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 28
Rumah Tangga Akses Air Minum Bersih

No	Kecamatan	RT	RT Akses Air Bersih	Persentase
1	Malifut	3479	1223	35.15%
2	Kao Teluk	1720	1350	78.49%
3	Kao	2457	1656	67.41%
4	Kao Utara	3575	1581	44.23%
5	Kao Barat	2478	1213	48.97%
6	Tobelo Selatan	3930	1507	38.34%
7	Tobelo Barat	1567	700	44.66%
8	Tobelo Timur	1820	675	37.07%
9	Tobelo	8720	5857	67.17%
10	Tobelo Tengah	4234	4084	96.45%
11	Tobelo Utara	3117	1466	47.03%
12	Galela	2233	900	40.31%
13	Galela Selatan	2391	1482	62.00%
14	Galela Barat	2904	1171	40.32%

No	Kecamatan	RT	RT Akses Air Bersih	Persentase
15	Galela Utara	2358	819	34.74%
16	Loloda Utara	2678	1461	54.57%
17	Loloda Kepulauan	1897	1773	93.45%
Halmahera Utara		51558	28919	56,09%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sumber air minum bersih berbasis SPAM JP. Selain itu, apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2025 sebanyak 28.919 rumah tangga dengan realisasi tahun 2024 sebesar 35.331 rumah tangga, terjadi penurunan capaian sebesar 6.412 rumah tangga. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan cakupan data, di mana pada tahun 2025 data yang disajikan hanya mencakup rumah tangga yang memperoleh akses air minum bersih khusus melalui SPAM JP, sedangkan pada tahun 2024 data yang disajikan keseluruhan rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih.

(3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Realisasi Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak realisasinya mencapai (76,79%) atau sebanyak 39.594 rumah tangga dari total 51.558 rumah tangga. Untuk data capaian sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 29
Rumah Tangga Bersanitasi Layak

No	Kecamatan	RT	RT Sanitasi Layak	%
1	Malifut	3479	2392	68.60%
2	Kao Teluk	1720	1180	71.26%
3	Kao	2457	1751	82.98%
4	Kao Barat	2478	2056	81.31%
5	Kao Utara	3575	2907	66.65%
6	Tobelo Selatan	3930	2619	78.11%
7	Tobelo Barat	1567	1224	71.08%
8	Tobelo Timur	1820	1294	92.95%
9	Tobelo	8720	8105	85.19%
10	Tobelo Tengah	4234	3607	75.44%
11	Tobelo Utara	3117	2351	72.69%
12	Galela	2233	1623	80.51%
13	Galela Selatan	2391	1925	72.69%
14	Galela Barat	2904	2111	71.66%
15	Galela Utara	2358	1690	52.91%
16	Loloda Utara	2678	1417	70.73%
17	Loloda Kepulauan	1897	1342	68.60%
Halmahera Utara		51558	39594	76.79%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyak jumlah rumah tangga yang belum bersanitasi layak. Jika membandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 39.594 dengan realisasi 2024 sebanyak 26.034 rumah tangga, mengalami kenaikan sebanyak 16.906. Faktor pendukung meningkatnya rumah tangga bersanitasi layak karena pada Tahun 2025 dilakukan pembangunan tangki septik skala individual perdesaan pada Beberapa desa di Kecamatan Kao Barat untuk 265 rumah tangga, selain itu pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat juga pembangunan rumah layak huni yang dapat dilihat pada pembahasan poin 1 di atas, dan juga pembangunan yang dilakukan masyarakat secara mandiri.

(4) Persentase rumah tangga menggunakan listrik

Persentase rumah tangga menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Realisasi rumah tangga menggunakan listrik Tahun 2025 sebesar 110,02% atau sebanyak 56.774 rumah tangga dari total 51.558 rumah tangga. Jika membandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 56.774 rumah tangga dengan tahun 2024 sebanyak 54.878 rumah tangga maka terdapat kenaikan sebanyak 1.896 rumah tangga yang memiliki akses listrik. Pembahasan untuk Komponen kelistrikan memang bukan merupakan kewenangan langsung pemerintah kabupaten, namun tetap menjadi bagian penting dalam indeks pembangunan infrastruktur. Hal ini karena listrik merupakan instrumen strategis yang berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, meskipun bukan kewenangan daerah, keberadaan dan ketersediaan listrik tetap menjadi indikator yang relevan dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.

(5) Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap merupakan perbandingan antara Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik dan Sedang terhadap Total panjang jalan Kabupaten seluruhnya. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 km. Realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Tahun 2024 mencapai 58.71% atau 176.83 km terdiri 158.202 km dalam kondisi baik dan 18.63 km dalam kondisi sedang, sehingga masih terdapat dalam kondisi rusak ringan 22.30 km dan rusak berat 102.07 km. Jika membandingkan dengan realisasi sampai tahun 2024 yaitu panjang jalan dalam kondisi mantap adalah 184,89 maka terdapat penurunan panjang jalan dalam kondisi mantap. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan kondisi jalan.

(6) Rasio konektivitas transportasi wilayah (persen)

Rasio konektivitas transportasi wilayah merupakan indikator proxy yang

menggambarkan tingkat ketersediaan layanan transportasi. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum terhadap jumlah desa seluruhnya. Realisasi jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum mencapai (71,43%) atau sebanyak 140 desa terlayani trayek tetap angkutan umum dari total 196 desa atau sama dengan realisasi Tahun 2024.

(7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)

Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator proxy, merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya. Realisasi rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi Tahun 2025 sebesar (98,47%) atau sebanyak 193 desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler dari total 196 desa. Realisasi Tahun 2025 meningkat sebanyak 15 desa jika dibandingkan dengan realisasi 178 desa Tahun 2024.

Peningkatan pembangunan infrastruktur layanan dasar sangat dipengaruhi oleh membaiknya indikator komposit yang mencerminkan ketersediaan dan pemerataan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar. Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas mendorong efisiensi pelayanan publik, mempercepat arus informasi, serta membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan digital. Di sisi lain, konektivitas transportasi wilayah yang semakin baik turut memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat antar wilayah. Hal ini diperkuat mendukungnya proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap, yang menjadi tulang punggung konektivitas dan aksesibilitas, khususnya dalam menjangkau wilayah terpencil dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga ditopang oleh semakin luasnya akses terhadap layanan dasar seperti listrik, sanitasi layak, air minum bersih, serta rumah tinggal layak huni. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik menunjukkan adanya perluasan jaringan energi yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Akses sanitasi yang layak dan air minum bersih berkontribusi langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Sementara itu, ketersediaan rumah tinggal layak huni mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan hunian yang aman dan sehat. Secara keseluruhan, sinergi antar indikator tersebut menjadi faktor penunjang utama dalam mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur layanan dasar yang berkelanjutan dan merata.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya perbaikan pembangunan infrastruktur, khususnya pada sektor air bersih dan kondisi jalan mantap, antara lain masih terbatasnya jangkauan dan kualitas layanan air bersih akibat belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan, serta belum meratanya akses bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, kondisi jalan

Mantap yang belum maksimal dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pemeliharaan, tingginya beban lalu lintas dan belum ada fasilitas jembatan timbang untuk mengukur batas maksimal muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan investasi yang terarah, penguatan sistem pengelolaan dan pemeliharaan, serta perencanaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan air bersih dan kondisi jalan mantap jalan secara merata.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar melalui 14 (empat belas) program antara lain :

Tabel 30
Pagu Anggaran dan Realisasi Program

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	3.665.541.900,00	3.406.657.900,00	92,94
2		Program Kawasan Permukiman	26.563.170.238,00	19.488.747.798,00	73,37
3		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.928.515.000,00	1.392.539.000,00	72,21
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Persampahan Regional	949.114.560,00	675.000.000,00	71,12
5		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	105.240.000,00	0	0,00
6		Program Penataan Bangunan Gedung	781.640.000,00	0	0,00
7		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00
8		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.865.004.700,00	7.830.363.993,00	66,00
9		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.857.131.721,00	9.595.665.125,00	60,51
10		Program Penyelenggaraan Jalan	28.859.640.905,00	17.883.429.504,00	61,97
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	34.745.100,00	28.220.100,00	81,22
12	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	846.369.600,00	846.369.600,00	100,00
13		Program Pengelolaan Pelayaran	1.045.420.300,00	44.996.300,00	4,30
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.327.216.957,00	669.325.237,00	50,43
Jumlah			94.028.750.981,00	61.961.314.557,00	65,90

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 94.028.750.981,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.961.314.557,00 atau sebesar 65,90%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **99,04%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **65,90%** maka diperoleh nilai

efisiensi pencapaian sasaran sebesar **150,29%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan Sangat Efisien.

SASARAN 4
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN RUANG WILAYAH, LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang diusung oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Kategori Capaian **Cukup** karena mencapai nilai **70.49%**.

Tabel 31
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	2022	2023	2024			2025			Perbandingan Tahun 2024 - 2025		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Lingkungan	68,73	70,71	72,13	72,77	100,89	73,76	51,99	70,49	-30,1	-20,78	75,75

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indeks Ketahanan Lingkungan merupakan salah satu indikator dalam Indeks Desa. Perubahan dari Indeks Desa Membangun ke Indeks Desa berdasarkan Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Penetapan Indeks Desa (ID) sebagai indikator tunggal resmi untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) sebelumnya yang hanya 3 (tiga) indikator menjadi 6 (enam) yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola untuk memetakan status desa serta mengarahkan kebijakan pembangunan secara efektif.

Untuk Indeks Ketahanan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2025 adalah sebesar 51,99 dari target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025 yaitu sebesar 73,76 , dengan demikian realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu 72,77. terdapat beberapa alasan teknis mengapa skor indeks lingkungan (ekologi) Tahun 2025 terlihat mengalami penurunan atau perbedaan signifikan dibandingkan Tahun 2024. Secara umum, penurunan ini bukan selalu berarti kondisi lingkungan di desa memburuk secara fisik, melainkan karena adanya perubahan standar penilaian (SOP) dari Kementerian Desa (Kemendesa).

Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan tertinggi untuk tahun 2025 untuk tingkat desa terdapat di Desa Daru dengan skor 86 dengan status desa mandiri dan untuk desa yang mendapat nilai terendah adalah desa Torawat dengan skor 30 dengan status desa tertinggal, sedangkan

untuk nilai ketahanan lingkungan tingkat kecamatan untuk yang tertinggi adalah kecamatan tobelo dan yang terendah adalah kecamatan Loloda Kepulauan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitan perbandingan per kecamatan yang disusun oleh tim berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kab. Halmahera Utara Tahun 2026.

Tabel 32
Indeks Ketahanan Lingkungan Per-Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Desa Menurut Kategori ID 2025				Indeks Ketahanan Lingkungan
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
Tobelo	6	3	1	-	66,80
Tobelo Tengah	2	6	1	-	63,56
Galela Selatan	-	3	4	-	49,71
Galela Barat	-	6	3	-	59,22
Malifut	-	-	22	-	49,36
Kao Utara	1	5	4	2	51,33
Galela Utara	-	2	10	-	62,58
Tobelo Selatan	-		13	-	47,23
Tobelo Timur	-	2	3	1	50,83
Tobelo Barat	-	-	4	1	48,80
Kao Teluk	-	1	10	1	48,73
Kao	-	-	12	2	46,00
Galela	-	4	3	-	64,43
Kao Barat	-	1	8	12	39,81
Tobelo Utara	-	-	8	2	44,40
Loloda Utara	-	1	10	7	52,83
Loloda Kepulauan	-	-	5	5	38,20
Halmahera Utara	9	34	121	32	883,84
					51,99

Sumber Data: Data Kemendes 2025 yang diolah Tim LKjIP

Tabel 33
Perbandingan Indeks Ketahanan Lingkungan per Kecamatan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kecamatan	Tabel Perbandingan per Kecamatan		
	Rata-Rata Tahun 2024 (IDM) (Konversi ke 100)	Rata-Rata Tahun 2025 (ID)	Selisi (Penurunan)
	IKL	IKL	
Malifut	64.55	49.36	-15.18
Kao Teluk	65.46	48.73	-16.73
Kao	76.67	46.00	-30.67
Kao Barat	66.99	39.81	-27.18
Kao Utara	68.89	51.33	-17.56
Tobelo Selatan	80.51	47.23	-33.28
Tobelo Barat	60.00	48.8	-11.20
Tobelo Timur	80.00	50.83	-29.17
Tobelo	90.67	66.80	-23.87
Tobelo Tengah	80.74	63.56	-17.18
Tobelo Utara	70.00	44.40	-25.60
Galela	72.38	64.43	-7.95
Galela Selatan	70.48	49.71	-20.76
Galela Barat	76.30	59.22	-17.07
Galela Utara	81.11	62.58	-18.53
Loloda Utara	69.63	52.83	-16.80
Loloda Kepulauan	62.67	38.20	-24.47

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kab. Halmahera Utara Tahun 2026 dan diolah oleh penulis.

Berdasarkan data di atas, wilayah yang paling "terdampak" (dalam arti mengalami penurunan angka paling signifikan jika dibandingkan standar lama) adalah Kecamatan Tobelo Selatan sebesar -33.28 poin, Kecamatan Kao sebesar -30.67 poin, dan Kecamatan Tobelo Timur sebesar -29.17. Ini menunjukkan bahwa banyak aspek yang dulu menopang nilai "Ketahanan Lingkungan" kini telah dikelompokkan ke dalam Layanan Dasar (seperti akses air bersih dan sanitasi rumah tangga). Penurunan skor lingkungan pada data tersebut adalah akibat dari reklasifikasi indikator. Pemerintah melakukan penyempurnaan agar data lebih detail. Skor lingkungan 2025 lebih fokus pada pelestarian dan mitigasi, sementara aspek infrastruktur lingkungan (air, jamban) sudah ditarik ke dimensi Layanan Dasar. Penurunan nilai lingkungan ini adalah penurunan administratif, bukan penurunan kualitas lingkungan secara nyata.

Pencapaian peningkatan status desa di Kabupaten Halmahera Utara mengalami perubahan dimana pada Tahun 2025 status desa mandiri mengalami peningkatan sebanyak 9 (sembilan) desa jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang hanya 6 (enam) desa. Untuk desa yang berkategori maju di Tahun 2025 juga mengalami peningkatan dimana Tahun 2025 desa maju ada 34 desa dibandingkan dengan Tahun 2024 yang hanya 23 desa, untuk kategori desa berkembang juga mengalami peningkatan di Tahun 2025 yaitu 121 desa dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu 112, dan untuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah 32 desa. Dengan perubahan status desa tersebut secara langsung mempengaruhi status indeks ketahanan lingkungan Kabupaten Halmahera Utara untuk Tahun 2025, walaupun aspek yang dulu menopang nilai "Ketahanan Lingkungan" kini telah dikelompokkan ke dalam Layanan Dasar (seperti akses air bersih dan sanitasi rumah tangga).

Berikut adalah analisis mengenai penyebab penurunan tersebut:

1. Perubahan Struktur Dimensi (Diferensiasi Indikator)

Pada Tahun 2024, Indeks Desa Membangun (IDM) hanya menggunakan 3 dimensi: Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Namun, pada Indeks Desa 2025 (SOP terbaru), dimensi ini dipecah menjadi 6: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Karena dimensi yang semula hanya 3 kini dibagi menjadi 6, pembobotan dan distribusi indikator berubah. Indikator yang dulu masuk ke "Lingkungan" di IDM 2024, dipindahkan ke dimensi "Layanan Dasar" dan "Tata Kelola" pada versi 2025, sehingga skor murni di kolom lingkungan terlihat lebih kecil secara angka.

2. Standar Penilaian yang Lebih Tinggi (Edisi SOP 2025)

IDM Tahun 2024 hanya berfokus pada keberadaan bencana alam, fasilitas sanitasi umum, dan kebersihan lingkungan secara makro, sedangkan Indeks Desa 2025 (SOP Kemendesa), memasukkan indikator yang lebih tinggi dalam perhitungan pengelolaan sampah, seperti:

a. Pengelolaan Sampah & Limbah

Pada 2025, kriteria penilaian tidak lagi sekadar "ada tempat sampah", tetapi mencakup keterpaduan pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah cair. Jika desa belum memiliki sistem pengolahan (hanya sekadar mengumpulkan), skor akan otomatis lebih rendah dibanding standar 2024. Bukan lagi sekadar "ada tempat sampah", tapi apakah ada sistem pengolahan sampah (seperti Bank Sampah atau TPS3R).

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penilaian 2025 lebih menuntut bukti fisik keberadaan dan pemeliharaan RTH, bukan sekadar luas lahan kosong di desa.

c. Penambahan Indikator Mitigasi Bencana Aktif

Banyak desa mengalami penurunan skor karena pada Tahun 2025, indikator Mitigasi Bencana menuntut adanya dokumen perencanaan atau tindakan nyata (seperti simulasi atau ketersediaan alat evakuasi), bukan hanya status "daerah tidak rawan". Jika sebuah desa dianggap aman di 2024 namun tidak memiliki sistem peringatan dini atau jalur evakuasi yang terstandar di 2025, maka nilai ekologi akan terkoreksi turun. Ketersediaan jalur evakuasi dan sistem peringatan dini yang teruji dan Kualitas Air & Sanitasi: Standar yang digunakan lebih mendekati standar kesehatan nasional yang lebih tinggi.

Upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan Sebagai berikut :

1. Transformasi Tata Kelola Lingkungan

Mendorong Desa untuk menyusun Perdes Pengelolaan Sampah sesuai standar.

2. Formalisasi Mitigasi Bencana

a. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)

b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)

c. Pemasangan Rambu Evakuasi

3. Digitalisasi Dokumentasi dan Inventarisasi RTH

Sertifikasi dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim Tahun 2025 melalui 12 (dua belas) program antara lain:

Tabel 34
Pagu Anggaran dan Realisasi Program

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.515.512.700.00	1.391.347.700.00	91.81

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2	Ruang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	566.933.848.00	312.732.900.00	55.16
3		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.627.074.826.00	4.880.430.426.00	86.73
4	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	500.000.000.00	500.000.000.00	100
5		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.332.195.830	417.216.683.00	31.32
6		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.552.626.100	1.415.728.544	91.18
7		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	102.791.800	59.917.200	58.29
8		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	85.762.200	85.700.880	99.93
9		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	53.219.200	20.918.600	39.31
10		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	30.619.800	0.00	0
11		Program Pengelolaan Persampahan	12.505.580.543	11.308.653.862	90.43
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	7.379.437.880	6.449.285.257	87.40
Jumlah			31.251.754.718	26.841.932.052	85.89

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 31.251.754.718,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.841.932.052 atau persentase sebesar 85,89%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian sebesar **70.49%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **85,89%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **82,07%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

SASARAN 5

MENINGKATNYA TRANSFORMASI STRUKTURAL DAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN MELALUI INVESTASI PRODUKTIF YANG MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA LAYAK

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diusung oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan Kategori Capaian **Baik Sekali** dengan nilai capaian rata-rata **226,81%**.

Tabel 35
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	2022	2023	2024			2025			Perbandingan Tahun 2024 - 2025		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Pertumbuhan Investasi PMTB	24,34	-32,01	8,21	3,32	40,44	7	45,38	648,29	607,85	42,06	11,3
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2,21	4,79	5,85	5,09	86,84	6,57	3,91	59,51	-27,33	-1,17	7,28
3	Pertumbuhan PDRB Pariwisata	2,67	1,38	10,29	1,80	17,49	2,3	4,58	199,13	181,64	2,78	18,09
4	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	3,20	3,68	12,58	12,71	101,03	12,58	18,20	144,67	43,64	5,49	12,58
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.06	6,53	3,76	6,2	35,11	5,7	6,7	82,46	47,35	0,5	2,74
Rata-rata									226,81			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Pertumbuhan Investasi PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator utama investasi dalam PDRB/PDB (Bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dll) yang menggambarkan penambahan aset tetap di suatu wilayah. Sasaran utama adalah mendorong laju pertumbuhan investasi (PMTB) yang tinggi dan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laju pertumbuhan investasi PMTB memiliki beberapa komponen dimensi utama yang menjadi acuan Pengukuran dan analisisnya

a) Nilai Investasi (dicanangkan, disetujui, dan terealisasi)

Kabupaten Halmahera Utara, pertumbuhan Investasi Tahun 2025 tercatat 45,38%.

b) Sektor Ekonomi yang dituju

Di tingkat Kabupaten Halmahera Utara sektor yang berpotensi yang menjadi fokus investasi PMTB adalah sektor industri pengolahan (18,20%), Pengadaan Listrik dan Gas (9,60%), Jasa keuangan dan asuransi (7,81%), Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil (7,35%) dan konstruksi (6,18%).

c) Wilayah penyelenggaraan proyek

Investasi PMTB di Halmahera Utara terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam atau aksesibilitas yang baik, seperti Kawasan sekitar jalur transportasi utama atau lokasi dengan potensi perusahaan.

Laju pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara dari hasil perhitungan berdasarkan laju pertumbuhan atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran yaitu:

Gambar 14
Grafik Laju Pertumbuhan Investasi PMTB



Sumber Data: Halut dalam angka Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas, Laju Pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2023 - 2025) dan terus naik secara signifikan hingga mencapai pertumbuhan 45,38 persen di tahun 2025. Jika, dibandingkan dengan Realisasi atau pertumbuhan tahun 2024 yaitu 3,32%, maka Laju Pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara mengalami pertumbuhan sangat pesat di tahun 2025, yaitu 45,38%. Laju pertumbuhan Investasi PMTB tahun 2025 lebih tinggi 42,06 persen dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 648,29%. Jika disandingkan dengan capaian provinsi Maluku Utara tahun 2025 yaitu 25,38% pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi / lebih cepat dari laju pertumbuhan investasi PMTB Maluku Utara dan Nasional (Indonesia) 5,09%. Berdasarkan <https://halutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/c9296ffa9080816be88ab3d6/kabupaten-halmahera-utara-dalam-angka-2026.html> Berita Resmi Statistik Propinsi Maluku Utara No. 09/02/82/Th.XXV, Tanggal 5 Februari 2026 dan Berita Resmi Statistik Indonesia No. 18/02/th.XXIX, 5 Februari 2026.

Analisis peningkatan persentase investasi di Kabupaten Halmahera Utara terjadi peningkatan dari Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 36
Data Investasi

Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun 2024	Nilai Investasi Tahun 2025
Penanaman Modal Asing (PMA)	1.540.950.643	83.167.623.207
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	511.919.118.476	1.103.263.694.867
Jumlah	513.460.069.119	1.186.431.318.074

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Halmahera Utara 2024, 2025.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Investasi di Tahun 2025 dari Tahun sebelumnya Tahun 2024. Keberhasilan capaian ini disebabkan karena:

- Keamanan dan kepastian hukum: Situasi politik yang stabil di Kabupaten Halmahera Utara meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal dalam jangka Panjang.

- b) Inflasi yang rendah dan rupiah yang stabil mengurangi resiko biaya operasional bagi investor, Maluku Utara sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat di Indonesia pada Tahun 2025 sehingga berdampak pada Kabupaten Halmahera Utara dalam menjaga stabilitas harga (inflasi rendah) meskipun pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi.
- c) Adanya minat pelaku usaha terhadap potensi Kawasan di Kabupaten Halmahera Utara
- d) Penyederhanaan Perizinan (Undang-Undang Cipta Kerja): Kemudahan dalam Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (*Online Single Submission*) oleh pemenuhan komitmen dari OPD Teknis. Pemenuhan komitmen OSS sudah dilakukan secara *online*.
- e) Penambahan/perluasan anak perusahaan PT. Niko (pancang) di sebagian besar kecamatan
- f) Beraktifitasnya kembali Bandara Gamarmalamo Galela dan Kuabang Kao serta pelayaran melalui kapal perintis dan tol laut.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan Investasi PMTB pada Tahun 2026 Halmahera Utara lebih mengoptimalkan:

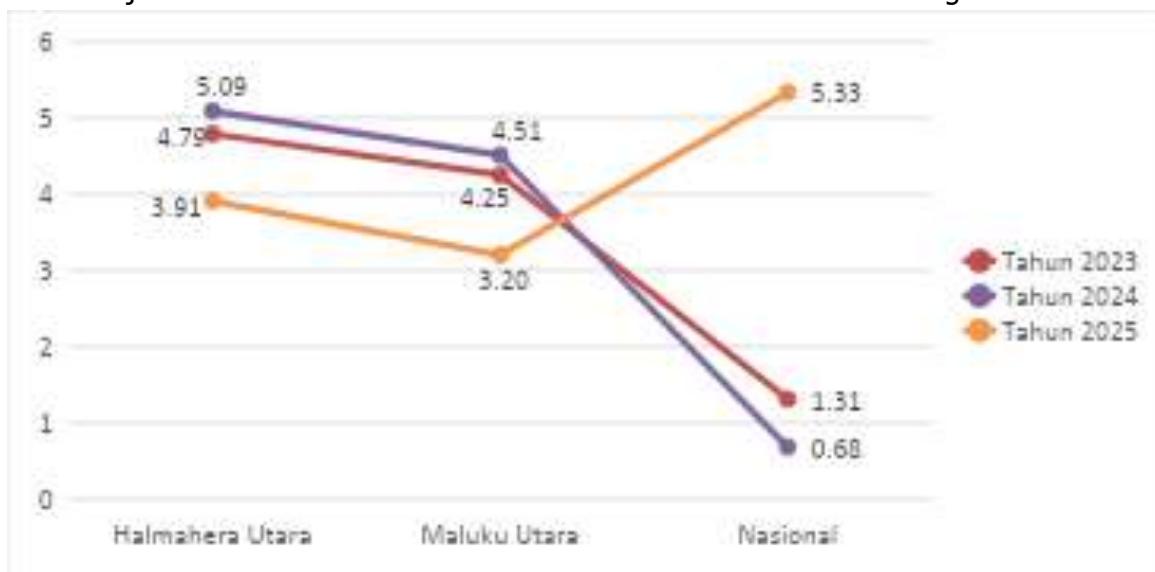
- a) Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Terus melakukan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha;
- c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan *workshop*, bimtek, dan diikutkan diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- d) Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.
- e) Mengupayakan peningkatan status pelabuhan melalui Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

2. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Nilai sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dalam pertumbuhan PDRB diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan metode hitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara dengan memperhitungkan sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sedangkan perikanan dan kelautan terdiri dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Gambar 15

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan 2010



Sumber Data: Halut dalam angka Tahun 2026

Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 tumbuh 5,09% dan Tahun 2025 tumbuh melambat 3,91%. Target Tahun 2025 yaitu 6,57% sedangkan laju pertumbuhan 3,91% dari hasil tersebut maka capaian lebih rendah 1,18% dari target yang ditetapkan atau belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan. Jika, disandingkan dengan capaian Provinsi Maluku Utara 3,20% dan secara Nasional 5,33% maka capaian Halmahera Utara lebih cepat pertumbuhannya dari capaian Provinsi Maluku Utara dan dibawah laju pertumbuhan Nasional. Analisis/menurunnya pertumbuhan di Tahun 2025 dapat dilihat dari capaian per komoditas.

Tabel 37
Capaian Komoditas Tanaman Perkebunan Tahun 2024-2025

Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)		Produksi (ton)	
	2024	2025	2024	2025
Kelapa	49.303	49.303	73.053,18	73.822,39
Kakao	4.398	6.423	158,90	155,00
Pala	14.605	14.930	2.158,00	2.200
Cengkeh	3.737	3.747	724,15	233,26
Jumlah	72.043	74.403	76.094	76.411

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara 2025.

Tabel 38
Capaian Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2024-2025

Komoditas Tanaman Pangan	Luas Lahan (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ton/Ha)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Padi Sawah	5.296	1.282,5	4.847,90	932,5	25.976,04	5.254,5	23,08	15,8
Padi Gogo	2.888,40	1.803,45	2.877,64	422,75	7.769,62	1.169,30	45,90	2,77
Jagung	14.022,81	594	15.625,75	216	87.515,42	1.264,65	95,20	5,82
Ubi Kayu	1.712,13	1.738,50	1.916,60	1.875	18.984,18	19.409,63	9,90	10,35

Komoditas Tanaman Pangan	Luas Lahan (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ton/Ha)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Ubi Jalar	1.523,87	1.553	1.706,72	1.592	15.531,13	15.809,50	9,10	9,93
Kacang Tanah	398,14	248,50	726,63	94,75	1.525,94	177,05	2,10	1,87
Kacang Hijau	703,01	-	808,44	-	1.697,74	-	2,10	-
Jumlah	26.544	7.220	28.510	5.133	159.000	43.085	187	47

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara 2025.

Tabel 39
Capaian Populasi Ternak dan Unggas Tahun 2024-2025

Populasi Ternak dan Unggas (ekor)	2024	2025
Sapi	21.411	17.040
Kambing	13.039	10.089
Babi	21.464	14.464
Ayam Kampung	73.502	38.780
Itik/Itik Manila	35.520	24.615
Jumlah	164.936	104.988

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara 2025,

Tabel 40
Capaian Produksi Perikanan dan Kelautan Tahun 2024-2025

Tahun	Total Realisasi (Ton)	Produksi Tangkap (Ton)	Produksi Budidaya (Ton)
2024	23.794	23.520	274
2025	21.476	21.200	276

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara 2024, 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah capaian komoditas Perkebunan khususnya tanaman kelapa luas lahan tidak ada penambahan areal lahan, produksi ada peningkatan di Tahun 2025 namun relatif kecil sedangkan tanaman Kakao, Pala dan Cengkeh ada kenaikan pada luasan tanaman dan produksi. Tanaman Pangan terdiri dari Padi Sawah, Padi Gogo/Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau mengalami penurunan baik luas lahan maupun jumlah produksi. Peternakan yaitu populasi ternak Sapi, Kambing, Babi, dan Populasi Unggas yakni Ayam Kampung, Itik/Itik manila capaian populasi rentan menurun di Tahun 2025. Produksi Perikanan dan Kelautan yaitu perikanan tangkap mengalami penurunan produksi dan Perikanan Budidaya terjadi kenaikan produksi dengan selisih relatif kecil.

Analisis menurunnya Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan adalah:

- Produksi Tanaman Pangan khususnya (Padi Sawah, Padi Gogo/Ladang dan Jagung) menurun diakibatkan karena bibit yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat tersedia selesai masa tanam di tahun 2025.
- Perikanan Tangkap, menurunnya hasil tangkapan ikan oleh iklim yang berubah-ubah dengan adanya tekanan berupa indikasi penurunan kualitas perairan dengan musim atau cuaca yang

tidak mendukung, kurangnya sarana penangkapan ikan (API) yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas terbatas.

- c) Produksi Budidaya Perikanan, mengalami kendala karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung, meningkatnya harga pakan sehingga kurangnya pakan dalam produksi ikan, kurangnya modal usaha serta masih kurangnya pemahaman teknis dalam pengembangan usaha budidaya Air Tawar dan Payau, berkurangnya bantuan benih/pakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta beralih profesi pembudidaya perikanan ke profesi lainnya terlebih ke karyawan perusahaan.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan maka pada Tahun 2026 Halmahera Utara lebih mengoptimalkan yakni:

- a) Koordinasi yang berkelanjutan/intensif dengan instansi terkait dan para pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun provinsi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
- b) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian wajib dibekali pengetahuan dan keterampilan modern. Kualitas dan jangkauan program pelatihan seperti *workshop* sederhana mengenai teknik budidaya terbaru, penggunaan alat mesin, hingga manajemen usaha tani.
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas untuk mentransfer ilmu secara praktis ke para petani.
- d) Peningkatan produksi dengan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan tangkap dan budidaya
- e) Pembinaan dan pelatihan terhadap pembudidaya laut dan darat
- f) Penambahan modal usaha serta pangsa pasar yang menunjang produksi perikanan.
- g) Pemberian bantuan bibit kelapa kepada petani untuk peremajaan maupun perluasan area tanam.

3. Pertumbuhan PDRB Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 14 menyebutkan bahwa sektor pariwisata meliputi beberapa usaha pariwisata yaitu: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyedia akomodasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa.

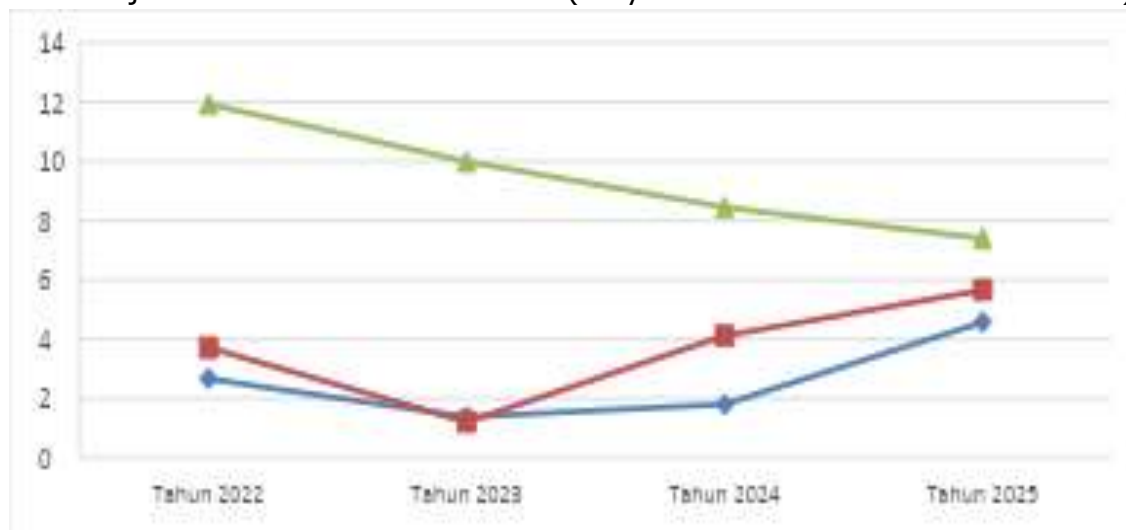
Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata atau Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah peningkatan nilai tambah bruto dari aktivitas akomodasi, makan-minum, dan jasa terkait pariwisata di suatu wilayah. Sektor ini berperan signifikan sebagai pendorong ekonomi daerah.

Badan Pusat Statistik menyajikan pertumbuhan PDRB Pariwisata adalah Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan unsur penting bagi wisatawan, selain objek wisata yang menjadi tujuan utamanya. Hasil perhitungan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) diperoleh capaian sebagai berikut:

Gambar 16

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)



Sumber Data: Halut dalam angka Tahun 2026

Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 yaitu tumbuh 4,58%, pertumbuhannya lebih cepat dari Tahun 2024 yaitu 1,80%. Kabupaten Halmahera Utara laju pertumbuhannya dibawah laju pertumbuhan Provinsi Maluku Utara yaitu 5,67% dan Nasional 7,41%. Target Tahun 2025 yaitu 2,3% dengan capaian realisasi 4,58% dari capaian tersebut maka pencapaian laju pertumbuhan PDRB Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) lebih tinggi 2,28%. Realisasi Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 199,13%. Jika, dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 yaitu 1,80%, Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Tabel 41

Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara

	Hotel				Jumlah Kamar				Tempat Tidur			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Malifut	2	2	2	2	15	18	18	18	15	18	18	18
Kao Teluk	0	0			0	0			0	0		
Kao	3	2	2	2	27	21	21	21	54	23	21	21
Kao Barat	0	0			0	0			0	0		
Kao Utara	0	0			0	0			0	0		
Tobelo Selatan	2	2	2	2	12	7	7	7	12	7	7	7
Tobelo Barat	0	0			0	0			0	0		
Tobelo Timur	1	3	3	3	8	24	24	24	8	24	24	24
Tobelo	30	30	30	31	480	513	513	523	672	620	620	632
Tobelo Tengah	6	6	6	6	193	195	195	195	266	239	239	239
Tobelo Utara	0	0			0	0			0	0		
Galela	0	0			0	0			0	0		
Galela Selatan	0	0			0	0			0	0		
Galela Barat	0	0			0	0			0	0		
Galela Utara	0	0			0	0			0	0		

	Hotel				Jumlah Kamar				Tempat Tidur			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Loloda Utara	0	0			0	0			0	0		
Loloda Kepulauan	0	0			0	0			0	0		
Kab. Halmahera Utara	44	45	45	45	735	778	778	788	1.027	931	929	941

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara Tahun 2022-2025

Tabel 42
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Halmahera Utara

Wisatawan	2022	2023	2024	2025
Mancanegara	101	892	930	1.005
Domestik	71.282	183.697	184.232	187.111
Jumlah	71.383	184.589	185.162	188.116

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara Tahun 2022-2025

Berdasarkan tabel diatas perkembangan wisatawan baik mancanegara maupun domestik meningkat dari Tahun 2022 sampai Tahun 2025. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

- a) Keamanan dan kenyamanan: Kabupaten Halmahera Utara telah menciptakan Situasi lingkungan yang aman dan ramah bagi pengunjung.
- b) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara mulai mendukung, promosi digital yang efektif.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Tahun 2026 Kabupaten Halmahera Utara lebih mengoptimalkan:

- a) Pengelolaan destinasi pariwisata dalam hal ini perbaikan fasilitas pariwisata
- b) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk memudahkan wisatawan yang berkunjung. Ini bisa dilakukan dengan membangun atau meningkatkan infrastruktur jalan dan transportasi publik, serta menciptakan jalur yang lebih mudah diakses ke tempat-tempat wisata di seluruh wilayah kabupaten.
- c) Ketersediaan fasilitas umum, yakni jaringan komunikasi, listrik, dan kesehatan yang memadai.
- d) Ketersediaan atraksi wisata yang unik dan berkualitas merupakan modal dasar untuk menarik minat wisatawan.
- e) Memaksimalkan peran promosi media untuk menguatkan citra daerah, yakni Penggunaan pemasaran digital dan event pariwisata yang efektif untuk menarik perhatian wisatawan.
- f) Perlunya pendampingan produksi dan pemasaran serta sertifikasi dan kemudahan akses permodalan bagi industri kreatif pendukung pariwisata, pengelola akomodasi, makan dan minum yang melibatkan stakeholder dan akademisi.

4. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Industri ini memiliki karakter yang sangat dinamis, sehingga pertumbuhan pada sektor ini dapat mendorong pertumbuhan di sektor lainnya. Faktor mendasar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di antaranya seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi baik di dalam dan di luar negeri, serta peningkatan penerimaan negara untuk memaksimalkan infrastruktur.

Nilai sektor Industri Pengolahan diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara yang dihitung berdasarkan metode hitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada Tahun 2025 dengan memperhitungkan sub sektor industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (Roti, kue kering, tahu, tempe, gula aren dan pengasapan ikan), Kimia dan bahan bangunan (Penggergajian kayu, perabot kayu, percetakan/fotocopy, Bata merah dan Pres), Sandang dan Kulit (Penjahitan), kerajinan dan umum (Kerajinan anyaman dan kerajinan lainnya) dan logam metal (Alat dapur, reparasi Bengkel Umum).

Gambar 17
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kab. Halmahera Utara



Sumber Data: Halut dalam angka Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas, laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (Tahun 2022-2025) dan cenderung terus naik secara signifikan hingga mencapai pertumbuhan 18,20% di Tahun 2025. Jika disandingkan dengan capaian provinsi Maluku Utara di Tahun 2022 tumbuh 36,4%, Tahun 2023 tumbuh lebih cepat 44,07% dan Tahun 2024 terjadi kontraksi atau pertumbuhan melambat 25,44% sedangkan Tahun 2025 tumbuh sangat pesat 62,64%. Disandingkan dengan tingkat Nasional Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 pertumbuhan mengalami fluktuasi atau pertumbuhan yang tidak stabil.

Capaian Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 (18,20 persen) lebih rendah atau lebih lambat pertumbuhannya dari capaian Provinsi Maluku Utara (62,64 persen) dan lebih cepat

pertumbuhannya dari tingkat Nasional (5,30 persen). Jika, dibandingkan dengan Realisasi atau pertumbuhan tahun 2024 yaitu 12,71 persen (angka sementara) yang dirilis Februari 2026 atau 9,98 persen (angka sangat sementara) rilis Februari 2025, maka laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan lebih cepat di tahun 2025. Sumber data BPS-kabupaten-halmahera-utara-dalam-angka-2026 Halaman 420 dan BPS-kabupaten-halmahera-utara-dalam-angka-2025 Halaman 420. Target capaian tahun 2025 yaitu 12,58 persen, realisasi 18,20 persen dengan capaian kinerja 144,67 persen maka capaian laju pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tahun 2025 sudah mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan.

Laju pertumbuhan PDRB Pengolahan Industri tumbuh lebih cepat karena adanya peningkatan Industri khususnya perusahaan Mikro pengolahan Industri makanan dan minuman sehingga dapat membuka lowongan kerja dilihat dari Jumlah Perusahaan Industri menurut klasifikasi industri dan klasifikasi izin di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023-2025.

Tabel 43
Jumlah Perusahaan menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Halmahera Utara

Klasifikasi Industri	2023	2024	2025
Pangan/Food	284	284	286
Kimia dan Bahan Bangunan/Chemical and Construction	150	150	150
Logam / Elektronika /Metal / Electronic	70	70	70
Sandang / Textile	18	18	18
Kerajinan dan Umum / General Industry	15	15	15
Total	537	537	539

Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Halmahera Utara

Tabel 44
Jumlah Perusahaan menurut Klasifikasi Izin di Kabupaten Halmahera Utara

Klasifikasi Izin	2023	2024	2025
Perusahaan Besar (<i>Big Company</i>)	64	42	72
Perusahaan Sedang (<i>Medium Company</i>)	342	18	223
Perusahaan Kecil (<i>Small Company</i>)	30	324	18
Perusahaan Mikro (<i>Micro Company</i>)	1.710	2.230	3.544
Kabupaten Halmahera Utara	2.146	2.614	3.857

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keberhasilan indikator pertumbuhan Industri Pengolahan yaitu:

- a) Peningkatan perusahaan kecil menengah yang berkembang pesat yang dapat memicu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di kabupaten Halmahera Utara.
- b) Peningkatan sistem kemitraan dengan pemasok, pemerintah, pengusaha besar, lembaga keuangan yang dapat mendukung industri pengolahan berkembang pesat.
- c) Sudah ada hilirisasi kelapa

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan maka pada

Tahun 2026 Kabupaten Halmahera Utara lebih mengoptimalkan hilirisasi pada komoditas lain.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu Indikator penting yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang berstatus pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15-64 tahun) dengan status bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang berstatus pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara Pada Agustus 2025 adalah 6,70% atau 9.749 orang dari 145.511 jumlah penduduk usia kerja (Sumber BPS Kab. Halmahera Utara Dalam Angka 2026) sedangkan target yang ditetapkan pada RPJMD yaitu 5,70 dengan capaian kinerjanya sebesar 82.46%, hal ini menunjukkan realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Agustus 2024 yaitu 6,20%, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,50% pada Agustus 2025. Jika dibandingkan dengan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat kedua tertinggi setelah Kota Ternate (Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2025 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2025 adalah 4,55% (<https://malut.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/842/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-44-persen--tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--sebesar-68-65-persen.html>) hal ini menunjukan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara masih lebih tinggi 2.15% dibanding Provinsi, Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat Nasional pada Agustus 2025 adalah 4,85% masih lebih tinggi 1,85% dibanding Kabupaten Halmahera Utara (Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id)

Analisis meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,50% pada Agustus 2025 antara lain:

- a) Lulusan sekolah dan Universitas tidak memiliki keterampilan yang memadai yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara kompetensi dan lowongan kerja;
- b) Pencari kerja yang hanya berminat bekerja di sektor formal;
- c) Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan minat pencari kerja;

- d) Besarnya jumlah karyawan yang dirumahkan pada perusahaan-perusahaan berskala besar akibat dari perubahan finansial dan bisnis yang tak terduga.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam rangka menekan angka pengangguran adalah:

- a) Mengupayakan agar program pelatihan kerja bagi pencari kerja berbasis kompetensi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) bisa berjalan optimal setiap tahun;
- b) Membuka peluang bagi para investor asing untuk membuka lapangan pekerjaan;
- c) Mengoptimalkan system untuk membangun jejaring informasi pasar kerja yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh para pencari dan pemberi kerja;
- d) Melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait 60% rekrutmen tenaga kerja lokal;
- e) Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja mikro dan makro untuk 5 tahun kedepan.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak Tahun 2025 melalui 20 (dua puluh) program antara lain:

Tabel 45
Pagu Anggaran dan Realisasi Program

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	200.000.000	200.000.000	100
2.		Program Pelayanan Penanaman Modal	230.000.000	229.876.000	99,94
3.		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	71.000.000	71.000.000	100
4.	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.016.743.000	609.186.731	30.21
5.		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.118.645.000	347.807.898	31.09
6.		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	140.171.210	127.901.210	91.25
7.		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500.000.000	399.675.000	79.94
8.		Program Penyuluhan Pertanian	946.227.640	799.625.350	84.51
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	545.694.800	385.009.000	70.55
10.		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	749.431.000	368.683.000	49.20
11.		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan	17.950.000	16.439.000	91.58
12.		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	392.865.000	313.631.000	79,83
13.	Dinas Parawisata	program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	183.130.000	183.130.000	100
14.		Program Pemasaran Parawisata	56.170.000	56.150.000	99.96
15.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	22.193.300	22.193.300	100
16.		Program Pengendalian Izin Usaha	10.500.000	10.500.000	100

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Industri Kabupaten/Kota			
17.		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	22.800.000	22.800.000	100
18.	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga kerja	100.000.000	56.762.300	56,76
19.		Program Penempatan Tenaga Kerja	30.000.000	6.619.400	22,06
20.		Program Hubungan Industrial	90.000.000	51.640.000	57,37
Jumlah			7.443.520,950	4.278.629,189	57,48

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 7.443.520.950,- terealisasi sebesar Rp. 4.278.629.189,- atau 57,48%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **226,81%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **57,48%** maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **394,58%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada sasaran ini **Sangat Efisien**.

SASARAN 6

MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT SERTA EFEKTIVITAS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI USAHA-USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN KREATIF

Sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang diusung oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kategori Capaian **Baik Sekali** dengan nilai capaian rata-rata **134,23%**.

Tabel 46
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	2022	2023	2024			2025			Perbandingan Tahun 2024 - 2025		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Ekonomi	42,64	49,64	50,29	49,76	98,94	50	82,56	165,12	66,06	32,8	60,07
2	Tingkat Kemiskinan	4,58	4,62	3,72	4,71	73,38	4,5	4,35	103,33	29,62	-0,36	3,57
Rata-rata									134,23			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi merujuk pada kemampuan suatu negara untuk tetap kokoh dan beradaptasi di tengah tekanan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengatasi guncangan eksternal, menjaga stabilitas makro ekonomi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan ekonomi juga melibatkan upaya untuk melindungi warga negara dari dampak negatif krisis, termasuk tingkat pengangguran dan penurunan daya beli.

Indeks ketahanan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu, diversifikasi produksi Masyarakat desa, karena semakin beragam jenis produk yang dihasilkan masyarakat desa maka semakin kuat ketahanan ekonomi, akses ke pusatke pusat perdagangan dan jasa, ketersediaan dan kemudahan akses ke pusat perdagangan dan jasa (seperti pasar, toko dan bank) sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi Masyarakat, serta lembaga ekonomi karena adanya lembaga ekonomi yang kuat (seperti kelompok tani, koperasi, atau asosiasi usaha) dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap Tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans.

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Untuk memastikan Ketahanan Ekonomi Desa secara mikro maka diperlukan alat untuk mengukurnya. Melalui pendekatan skoring dengan merumuskan indeks pada setiap deskripsi dan variabelnya, di Kabupaten Halmahera Utara terdapat 196 Desa, dengan jumlah Desa Mandiri 9, Maju 34 Desa Berkembang 121 Desa dan tertinggal 32 Desa, untuk Indeks Ketahanan Ekonomi pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai sebesar 82,56 dari target nilai sebesar 50, sedangkan pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai sebesar 49,76 dengan target nilai sebesar 50,29. Disini kita melihat bahwa nilai Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2025 sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan.

Nilai ketahanan ekonomi tingkat Desa tertinggi Tahun 2025 berada di Desa Gamsungi dengan perolehan poin dimensi Indeks Desa sebesar 142 dengan status Desa Mandiri, dan nilai terendah Tahun 2025 berada di Desa Wori Moi dengan perolehan nilai 38 dengan status Desa Tertinggal. Sedangkan untuk nilai Ketahanan Ekonomi tertinggi tingkat Kecamatan berada di Kecamatan Tobelo dengan perolehan nilai sebesar 116,20, dan yang paling rendah berada di Kecamatan Loloda Kepulauan. Dapat dilihat perbandingan per kecamatan dalam tabel berikut:

Tabel 47
Indeks Ketahanan Ekonomi Per-Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Desa Menurut Kategori ID 2025				Indeks Ketahanan Ekonomi
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
Tobelo	6	3	1	-	116,20
Tobelo Tengah	2	6	1	-	116,00
Galela Selatan	-	3	4	-	96,71
Galela Barat	-	6	3	-	94,33
Malifut	-	-	22	-	92,82
Kao Utara	1	5	4	2	85,25
Galela Utara	-	2	10	-	79,83
Tobelo Selatan	-	-	13	-	79,77
Tobelo Timur	-	2	3	1	78,67
Tobelo Barat	-	-	4	1	78,40
Kao Teluk	-	1	10	1	74,64

Kecamatan	Desa Menurut Kategori ID 2025				Indeks Ketahanan Ekonomi
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
Kao	-	-	12	2	72,71
Galela	-	4	3	-	70,57
Kao Barat	-	1	8	12	70,24
Tobelo Utara	-	-	8	2	68,30
Loloda Utara	-	1	10	7	67,06
Loloda Kepulauan	-	-	5	5	62,10
Halmahera Utara	9	34	121	32	1403,60
					82,56

Sumber Data: Data Kemendes 2025 yang diolah Tim LKjIP

Faktor keberhasilan Ketahanan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,89%, angka tertinggi sejak pandemi Covid-19. Keberhasilan ini didorong oleh kombinasi kinerja sektor industri, konsumsi domestik yang kuat, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Berikut adalah faktor-faktor kunci keberhasilan ketahanan ekonomi Halmahera Utara di Tahun 2025:

a) Pertumbuhan Sektor Unggulan

Beberapa lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan signifikan yang memperkuat struktur ekonomi daerah:

- Jasa Keuangan dan Asuransi: Menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 7,81%.
- Pengadaan Listrik dan Gas: Tumbuh sebesar 9,60%, mendukung infrastruktur energi untuk industri dan rumah tangga.
- Industri Pengolahan: Tumbuh 18,20%, yang mengindikasikan keberhasilan peningkatan nilai tambah produk lokal.

b) Penguatan Permintaan Domestik

Ketahanan ekonomi juga ditopang oleh tingginya aktivitas konsumsi di dalam daerah:

- Konsumsi Rumah Tangga: Tumbuh sebesar 6,48%, menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

c) Penurunan Angka Kemiskinan

Keberhasilan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan sosial:

- Persentase Penduduk Miskin: Per Maret 2025, angka kemiskinan turun menjadi 4,35%.
- Penurunan ini mencerminkan distribusi pertumbuhan yang mulai menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi Sebagai berikut :

- a) Penguatan UMKM di sektor pengolahan makanan dan minuman sebagai pilar pembukaan lapangan kerja baru.

- b) Meningkatkan kualitas sarana perdagangan.
- c) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- d) Mempermudah perizinan bagi pelaku usaha.

2. Tingkat Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: Pertama, Head Count Index (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 tercatat sebanyak 8.840 jiwa atau 4,35%. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Halut Tahun 2024 yang mencapai 4,71% atau sebanyak 9.480 jiwa. terdapat penurunan sebanyak 640 jiwa atau 0,36%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 48
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (Persen)	
	2024	2025	2024	2025
Halmahera Barat	10,650	9,690	8,75	7,9
Halmahera Tengah	6,440	5,610	10,71	9,16
Kepulauan Sula	8,310	8,050	7,96	7,65
Halmahera Selatan	13,690	11,780	5,63	4,81
Halmahera Utara	9,480	8,840	4,71	4,35
Halmahera Timur	12,27	11,050	11,91	10,54
Pulau Morotai	3,690	3,290	5,11	4,49
Pulau Taliabu	3,970	3,710	7,13	6,63
Kota Ternate	7,880	8,510	3,14	3,34
Kota Tidore Kepulauan	6,720	6,730	6,56	6,54
Maluku Utara	83,090	77,270	6,32	5,81

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, *March National Socioeconomic Survey*

Jika membandingkan realisasi Tahun 2025 dengan target kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara maka realisasi indikator tingkat kemiskinan Tahun 2025 sudah sangat baik dan melebihi dari target yang ditetapkan. Jika kita bandingkan realisasi tingkat

kemiskinan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-2 dalam perhitungan (persen) sedangkan menurut jumlah jiwa Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-7 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan tren positif dengan adanya penurunan. Data per Maret 2025 mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 4,35%, yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Faktor-faktor keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 meliputi:

- a) Pembukaan lapangan kerja, yang berdampak langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin.
- b) Pemberian bantuan (baik sosial tunai maupun non-tunai) tepat sasaran dan berkesinambungan antara lain Bantuan Sosial berupa peralatan usaha Rumah Tangga
- c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan keterampilan khusus seperti pelatihan merias bagi kaum wanita.
- d) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin.

Upaya Perbaikan untuk menurunkan angka kemiskinan diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pemberian bantuan sosial yang tetap sasaran.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif melalui 20 (dua puluh) program sebagai berikut:

Tabel 49
Pagu Anggaran dan Realisasi Program

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	10.590.000	10.590.000	100,00
2		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	324.443.800	215.564.000	66,44
3		Program Penanganan Kerawanan Pangan	138.710.400	69.859.200	50,36
4		Program Pengawasan Keamanan Pangan	97.336.000	97.336.000	100,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	95.094.000	95.094.000	100,00

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
6	Menengah	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	7.520.000	7.520.000	100,00
7		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.000.000	100.000.000	100,00
8		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	118.061.820	117.288.620	99,35
9		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	9.240.000	9.240.000	100,00
10	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	23.000.000	23.000.000	100,00
11		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	366.736.000	350.000.000,00	95,44
12		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	125.136.000	113.636.000	90,81
13		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	83.538.948	76.873.270	92,02
14		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	11.000.000	11.000.000	100,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	68.466.000	59.886.000	87,47
16		Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.532.133.620	579.521.680	16,41
17		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	850.000.000	843.077.000	99,19
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	31.499.600	21.999.000	69,84
19		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	56.225.800	56.225.800	100,00
20	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	349.370.000	10.264.900	2,94
Jumlah			6.398.101.988	2.867.975.470	44,83

Jika digabungkan dengan 2 indikator maka jumlah pagu anggaran untuk sasaran 6 sebesar Rp. 6.398.101.988 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.867.975.470 atau sebesar 44,83%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **134,23%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 44,83%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **299,45 %**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 7
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DAERAH BERBASIS INOVASI YANG BERKELANJUTAN

Sasaran strategis 7 diukur dengan 2 (dua) indikator yang diusung oleh 12 (dua belas) Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kecamatan dan Inspektorat dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai **127,07%**.

Tabel 50
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	2022	2023	2024			2025			Perbandingan Tahun 2024 - 2025		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin)	13,96	-3,96	8,82	18,34	207,94	12,97	20,09	154,9	-53,04	1,75	84,34
2	Nilai Reformasi Birokrasi	48,18	45,33	-	54,69	-	60,2	59,75	99,25	-	5,06	-
Rata-rata									130,9			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin)

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Indikator inovasi daerah diukur dengan membandingkan antara indeks inovasi daerah tahun yang ditinjau dengan indeks inovasi daerah tahun sebelumnya. Indeks inovasi daerah setiap Tahun akan dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 54,91 predikat Inovatif. Pencapaian ini mengalami peningkatan dari capaian pada Tahun 2024 yaitu 34,82 predikat Kurang Inovatif.

Keberhasilan indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah dikarenakan jumlah Inovasi Daerah yang dilaporkan meningkat dari Tahun 2024 sebanyak 8 inovasi menjadi 38 inovasi di Tahun 2025. Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang menjadi Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	TAHAPAN INOVASI
1	SI-DIDa-HALUT (Sistem Informasi Database Inovasi Daerah Halmahera Utara)	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
2	E_Perjadin Non Tunai	Sekretariat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
3	Pengembangan Fitur API Aplikasi Satu Data Halmahera Utara	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
4	PAPEDASAGU (Pelayanan Administrasi Kependudukan Serba Guna)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
5	BAHAGIA	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
6	SIPETARUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
7	Henok (Aplikasi Pakan HENOK dalam Meningkatkan Berat Sapi)	Dinas Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
8	Pengembangan Aplikasi Satu Data Halmahera Utara	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
9	ALARM SAYANG IBU (ASI)	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
10	SI DEWI MANTAP	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
11	Reservasi Online dan Anjungan Pendaftaran Mandiri	RSUD Tobelo	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
12	MICROSITE (WEBSITE MINI)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
13	GELORA (GELang Orientasi RAMah)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
14	SiPAHIT (Sistem PengaduAn Hubungan Industrial Terintegrasi) Halmahera Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
15	TIKAM PTM KAB.HALUT (Tujuh Inisiatif Kendalikan Angka Mordibitas dan Mortalitas Penyakit Tidak Menular)	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
16	CIPTA (Coaching Interview, Pembuatan CV & konsultasi karir) Halmahera Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
17	SI-DAK (Sistem Informasi Data Absen dan Kinerja)	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDA	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	TAHAPAN INOVASI
18	LALAMPA (Lihat dan Lapo Masalah Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
19	JANGKAR (Jaringan Angkutan Komunitas Pedesaan yang Terpercaya)	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
20	Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Halmahera Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
21	SEPINTAS HALUT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
22	POPARE (Personal Electronic Patient Records)	RSUD Tobelo	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
23	SIPANDO (SISTEM PENGADUAN ONLINE)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
24	LANSIA' Layanan Siaga Bencana'	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
25	POPEDA (Pengelolaan dan Penyajian Dokumen Elektronik Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Penerapan
26	Integrasi Sapi Kelapa - ISAKE	Dinas Pertanian	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Penerapan
27	Satu Data Satu Peta - SatSet	Dinas Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
28	KADARPAN (KELUARGA SADAR PANGAN)	Dinas Ketahanan Pangan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
29	DEWATA-HALUT (Desa Wisata Halmahera Utara)	Dinas Pariwisata	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Penerapan
30	Marahai Plastic Home	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
31	SIDABILOHA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Penerapan
32	Sipusot (Sistem Pustaka Otomasi)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
33	SOSIRU (Sistem Otorisasi Penentuan Koordinat Batas Terpadu)	Sekretariat Daerah- Bagian Tata Pemerintahan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Penerapan
34	PESAN MANTAN MENGGUNAKAN GOOGLE FORM	Dinas Sosial	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
35	JALIN ASMAR (Jaringan Lintas Aspirasi Masyarakat)	Sekretariat DPRD	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
36	GENERIK DENGAN RUMAH DATA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	TAHAPAN INOVASI
37	INFO BAKSO POLITIK HALUT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
38	SIMARDI	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Uji Coba

Sumber Data: Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara

Target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara indikator peningkatan indeks inovasi daerah adalah sebesar 84,34. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 indikator ini masih jauh dari target jangka menengah. Realisasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah dengan Pemerintah Kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara meningkat dari Tahun lalu yaitu sebelumnya berada di peringkat ke-8 namun di Tahun ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-5 dari 10 Kabupaten/Kota. Perbandingan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara peningkatan Indeks Inovasi Daerah sebesar 5,17 dengan nilai indeks inovasi daerah sebesar 63,64. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan lebih tinggi namun nilai Indeks Inovasi Daerah-nya lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Secara Nasional, Indeks Inovasi Daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Balangan dengan Skor Indeks 96,80 predikat Sangat Inovatif. Dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Halmahera Utara masih selisih nilai sebesar 41,89. Selisih ini tergolong tinggi dalam skala Indeks Inovasi Daerah (IID) yaitu 0-100. Hal ini berimplikasi pada perbedaan daya saing daerah, baik dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah secara umum.

Pencapaian poin Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Halmahera Utara secara periodik terjadi peningkatan yang cukup baik. Perubahan besar dengan status Kabupaten Halmahera Utara yang kurang inovatif menjadi Kabupaten yang inovatif menjadi suatu capaian yang diperoleh berdasarkan jumlah inovasi yang di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui IGA (*Innovation Government Award*). Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah melakukan beberapa strategi antara lain:

- Melakukan Sosialisasi Intensif serta Perkuat Komitmen dan Kesadaran, dengan maksud meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya IID;
- Optimalisasi Bukti Dukung dengan mempersiapkan dokumen pendukung inovasi secara baik dan berkualitas;
- Dorongan Inovasi Sistematis, mengembangkan strategi untuk memasifkan inovasi di tingkat Perangkat Daerah melalui berbagai aksi perubahan;
- Melakukan pendampingan intensif dan pelatihan bagi perangkat daerah untuk memenuhi persyaratan penilaian;
- Mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih inovatif dan proaktif dalam memecahkan masalah.

Upaya perbaikan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang peningkatan IID Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2026 yaitu:

- a) Komitmen pimpinan mewajibkan semua perangkat daerah melakukan minimal 1 (satu) inovasi;
- b) Replikasi Inovasi, dengan cara meniru dan modifikasi inovasi yang sudah berhasil di daerah lain sesuai dengan kebutuhan lokal;
- c) Penguatan regulasi inovasi daerah, pembentukan kelembagaan inovasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pelaporan inovasi secara berkelanjutan.

2. Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Instansi Pemerintah yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Nilai Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi Nilai Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2025 sebesar 59,75 (nilai sementara/masa sanggah) dan pada Tahun 2024 sebesar 54,69 menunjukkan bahwa capaian Nilai Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,06 poin. Walaupun belum mencapai target yaitu 60,2 atau Kategori B, namun hasil ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara. Evaluasi Reformasi Birokrasi terbagi atas RB General dan RB Tematik yang didalamnya terdapat beberapa aspek penilaian. Untuk RB General aspek penilaiannya yaitu Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi, Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi, dan Strategi Pelaksanaan RB General. RB Tematik aspek penilaiannya yaitu Capaian Indikator Dampak dan Strategi Pembangunan. Dibandingkan dengan Tahun 2024 dari semua aspek evaluasi Reformasi Birokrasi baik RB General maupun RB Tematik pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi yaitu komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya perbaikan untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi antara lain:

- a) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan;
- b) Mengoptimalkan penggunaan SP4N-LAPOR melalui pembentukan Tim dan sosialisasi kepada pengguna layanan;

c) Mendorong peningkatan Sistem Merit.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan Tahun 2025 melalui 29 (dua puluh sembilan) program antara lain:

Tabel 52
Pagu Anggaran dan Realisasi Program

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.393.151.104	53.823.526.109,94	90,62
2.	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.010.547.553	9.905.939.734	89,97
3.		Program Perekonomian dan Pembangunan	1.534.835.022	835.411.195	54,43
4.	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.018.145.000	13.282.761.090	94,75
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	58.866.000	48.591.000	82,55
6.		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.386.198.184	2.091.829.000	87,66
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Program Informasi dan Komunikasi Publik	926.047.000	881.213.900	95,16
8.		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informas	24.889.600	24.360.000	97,87
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	907.207.150	765.978.500	84,43
10.		Program Pencatatan Sipil	349.999.640	313.946.300	89,7
11.		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	543.285.680	395.714.000	72,84
12.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.616.198.554	1.836.378.759	70,19
13.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	927.980.862	459.294.115	49,49
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.922.109.000	5.006.471.990	84,54
15.		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.198.838.500	829.668.801	69,21
16.	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	328.599.300	326.907.500	99,49
17.		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	113.493.700	66.763.700	58,83
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	221.945.192.658	63.901.122.737	28,79
19.		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.558.178.400	1.473.279.883	94,55
20.		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.776.314.700	3.554.088.038	94,12
21.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	1.794.360.000	1.400.901.847	78,07
22.		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.631.111.800	2.130.732.093	80,98
23.	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	174.518.900	167.956.703	96,24

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
24.		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	169.432.000	167.568.000	98,9
25.		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	153.142.000	149.942.000	97,91
26.		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	448.374.242,18	439.375.424,56	97,99
27.		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	365.883.900	361.851.864	98,9
28.	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.252.200.400	2.671.558.500	82,15
29.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	774.437.500	655.639.500	84,66
Jumlah			339.303.538.349,18	167.968.772.283,50	49,5

Jumlah pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 339.303.538.349,18 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.968.772.283,5 atau sebesar 49,5%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **127,07%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **49,5%** maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **256,7%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran Tahun 2025 disusun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung program dan kegiatan prioritas. Setiap alokasi diarahkan untuk mencapai target yang telah dirancang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Selain itu, penyerapan anggaran akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan bahwa realisasi belanja sesuai dengan rencana serta memberikan dampak maksimal. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan anggaran dapat digunakan secara efisien dan transparan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Tahun 2025 jumlah anggaran per sasaran strategis dengan 122 Program Prioritas adalah Rp. 764.722.896.214,18 dan terealisasi sebesar Rp. 609.968.440.963,5 atau persentase sebesar 79,76%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran LKjIP Tahun 2024 sebesar Rp. 199.846.746.270, maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 77.687.589.373 atau persentase sebesar 38,87%.

Untuk itu digambarkan dalam tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf Pendidikan dan Kesempatan belajar masyarakat	8	274.385.314.358	248.216.138.073	Dinas Kesehatan, RSUD Tobelo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	19	11.911.914.870	9.783.679.339	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	14	94.028.750.981	61.961.314.557	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	12	31.251.754.718	26.841.932.052	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	20	7.443.520.950	4.278.629.189	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	20	6.398.101.988	2.867.975.470	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	29	339.303.538.349,18	167.968.772.283,5	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan PSDA, Kecamatan dan Inspektorat
TOTAL		122	764.722.896.214,18	609.968.440.963,5	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja, tergambar pada tabel hasil analisis capaian kinerja sasaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 54
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,5,6,7	57,14
2	Baik (B)	2,3	28,57
3	Cukup (C)	4	14,29
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		7	7

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 7 sasaran dengan pembagian sasaran adalah **4** sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)**, **2** sasaran dinyatakan **Baik (B)** dan **1** sasaran dinyatakan **Cukup (C)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah:

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 khususnya Tahun Anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Piet Hein Babua, M.Si**

Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 20 Januari 2026

Bupati Halmahera Utara,



Dr. Piet Hein Babua, M.Si

Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan inovatif sebagai penggerak daya saing daerah yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,14
2	Terwujudnya akses pendidikan yang merata dan bermutu dalam membentuk generasi berkarakter, melalui penguatan pendidikan dasar, usia dini, dan pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Pendidikan Daerah	Angka	69,63
3	Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh melalui penguatan layanan serta sistem kesehatan dasar dan rujukan yang merata, bermutu, dan berpihak pada kelompok rentan.	Indeks Kesehatan Daerah	Angka	83,15
4	Terwujudnya penguatan ketahanan keluarga, pembinaan generasi muda berbasis karakter dan solidaritas, serta perlindungan sosial adaptif yang memberdayakan kelompok rentan dan penyintas	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	59,93
5		Indeks Produktivitas Pemuda	Angka	84,35
6		Tingkat Kemiskinan (persen)	%	4,07
7	Terwujudnya masyarakat yang religius dan berkebudayaan maju dalam prinsip inklusivitas dan kesetaraan sebagai penegas identitas daerah	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,19
8	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung religiusitas, kebinekaan, dan HAM melalui penguatan ideologi kebangsaan, kesetaraan gender, perlindungan sosial responsif, serta solidaritas komunitas yang adaptif terhadap kerentanan & konflik	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,48
9	Terwujudnya ketahanan sosial budaya sebagai sumber identitas daerah melalui pelestarian warisan budaya, penguatan kelembagaan, serta pengembangan ruang ekspresi dan partisipasi warga	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Warisan Budaya)	Angka	53,34
10	Terwujudnya perekonomian daerah yang kokoh, produktif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	%	3,8
11		Pendapatan per Kapita	Rp. Juta	20,90
12		Indeks Rasio Gini	Angka	0,2
13	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal	PDRB Pertanian/Perikanan per Tenaga Kerja	%	41,12
14		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,45

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
15	Terwujudnya pertumbuhan investasi dan hilirisasi yang mendorong terbentuknya ekosistem industri berkelanjutan, terbuka, dan berpihak pada pelaku lokal, serta terintegrasi dalam rantai nilai nasional dan global	Persentase PDRB Industri Pengolahan (persen)	%	4
16		Persentase PDRB Penyediaan Akomodasi & Makan minum (persen)	%	0,3
17		Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	%	37,32
18		Net Ekspor Antar Daerah (persen PDRB)	%	-10,69
19	Terwujudnya penumbuhan usaha- usaha produktif, penciptaan kerja layak yang setara dan inklusif, serta perluasan partisipasi ekonomi masyarakat di berbagai sektor dan wilayah tanpa diskriminasi	Persentase Kewirausahaan Daerah (persen)	%	5,17
20		Persentase Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (persen)	%	1,31
21		Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	%	6,2
22		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	%	60
23	Terwujudnya kemajuan wilayah dengan sarana prasarana handal dan ramah lingkungan, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Desa	%	65,96
24	Terwujudnya akses yang adil dan merata terhadap infrastruktur dasar dan konektivitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	80,02
25	Terwujudnya pengembangan wilayah yang adaptif, adil, dan berdaya saing melalui pemanfaatan potensi lokal dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru	Persentase Desa Mandiri	%	4,59
26		Koefisien Variasi ID Antar Kecamatan	Angka	10,44
27	Terwujudnya daya dukung lingkungan yang terjaga dan ketahanan wilayah yang meningkat terhadap bencana serta dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	80,09
28		Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Angka	157,61
29	Terwujudnya pemerintahan daerah yang berwibawa dan dipercaya, serta daerah kondusif untuk mendorong daya saing daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas	Angka	73
30		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,97
31	Terwujudnya tata kelola yang menjamin ketertiban dan ketenteraman melalui penegakan hukum daerah adil, mitigasi risiko yang kolaboratif, serta kehadiran aparaturnya yang sigap dan terpercaya di ruang publik	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	62,41
32	Terwujudnya layanan publik yang inklusif, dan adaptif melalui transformasi	Indeks Pelayanan publik	Angka	3,7

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
33	digital yang terpadu, administrasi kependudukan yang presisi, serta perlindungan sistem informasi dan dokumen strategis pemerintahan	Indeks SPBE	Angka	2,98
34	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel melalui reformasi birokrasi berbasis sistem merit, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan pengawasan dan manajemen risiko	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	63,16
35		Persentase Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)	%	0,32
36	Terwujudnya birokrasi adaptif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan kebijakan berbasis bukti, serta kolaborasi	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56

Tobelo, 20 Januari 2026

Bupati Halmahera Utara,



Dr. Piet Hein Babua, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
INSPEKTORAT
Jln. Kawasan Pemerintahan
TOBELO

Pos 97762

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu LKj Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 8 April 2026
Inspektur

Drs. Tonny Kappuw
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197208171992031011

CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2025

NO	PERNYATAAN		Check List	
			Ada	Tidak
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. LKj Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya		
III	Substansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		4. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kerja	√	
		5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai		√
		10. IKU dan IK telah SMART	√	